

INTERNALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI  
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA,  
KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR)

*Social Capital Internalisation as  
Community Empowerment Strategy to  
Cope with Poverty  
(a Case Study in North Bara-baraya Village,  
Makassar District of Makassar City)*

SURYANTO



PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011

INTERNALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI  
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA  
KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR)

*Social Capital Internalisation as  
Community Empowerment Strategy to  
Cope with Poverty  
(a Case Study in North Bara-baraya Village,  
Makassar District of Makassar City)*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

SURYANTO

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011



## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryanto  
Nomor Pokok : P160208002  
Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini dengan benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Juli 2011

Yang menyatakan

**Suryanto**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan magfirah kepada kita semua. Amin. Dan shalawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan tesis ini penulis mengalami banyak tantangan dan hambatan, namun berbagai bantuan dan bimbingan yang baik dan ikhlas dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat penulis rampungkan. Dari lubuk hati yang terdalam izinkan penulis untuk menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta H. Arifin Lammade dan Hj. Nahria Kattang, kedua mertua tercinta H. Tadjuddin dan Hj. Nadjmah serta isteriku Nurhayati Suryanto, SE adikku Sumaini Arifin, S.Pd atas segala jerihpayahnya untuk penulis semoga Allah SWT membalasnya dengan segala kebaikan dunia dan akhirat.

Tanpa bantuan, arahan dan masukan serta kritik dari orang-orang yang telah member inovasi dan ilmu, kepadanya penulis mengucapkan terima kasih yang tertinggi. Seingga pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS selaku Penasihat I
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina NK, MA selaku Penasihat II
3. Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU, Prof. Drs. H.A.R. Hafiedz, MS, Dr. H.M. Darwis, DPS, MA selaku tim penguji

4. Prof. Dr. Maria E. Pandu, MA selaku Ketua Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin
5. Kawan-kawan seangkatan 2008 Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin
6. Kawan-kawan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin

Makassar, 1 Juli 2011

Penulis

**Suryanto**

## ABSTRAK

**SURYANTO.** *Internalisasi Modal Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar.* (dibimbing oleh **Darmawan Salman** dan **Dwia Aries Tina NK**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) bagaimana bentuk dan eksistensi modal sosial pada masyarakat. (2) fungsi dan peran (kontribusi) modal sosial sebagai salah satu pilar pemberdayaan masyarakat mengatasi masalah kemiskinan. (3) upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong modal sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bara-baraya Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan merupakan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, Fokus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk dan eksistensi modal sosial berada pada lembaga BKM Surya Abadi dan Yayasan Mesjid Ilham Seksi Kesejahteraan Jamaah, 2) kontribusi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu perluasan akses kesehatan berupa santunan kepada masyarakat, perluasan akses pendidikan berupa pelatihan peningkatan SDM, perluasan akses ekonomi berupa penyaluran bantuan dana bergulir, perluasan akses lingkungan berupa program green and clean dan pembangunan lingkungan, 3) upaya yang dilakukan untuk mendorong modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui proses pembelajaran masyarakat, penguatan kelembagaan, dan peran pemerintah lokal dalam penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci : modal Sosial, kelembagaan, penanggulangan kemiskinan

## ABSTRACT

**SURYANTO.** Social Capital Internalisation as Community Empowerment Strategy to Cope with Poverty: a Case Study in North Bara-baraya Village, Makassar District of Makassar City (Supervised by **Darmawan Salman** and **Dwia Aries Tina NK**).

The study aims (1) to investigate the existence of social capital in the community, (2) to analyse the function and roles of social capital, as one of the pillars of community empowerment to cope with poverty problems, and (3) to describe the endeavour made to foster social capital to cope with poverty.

The study was carried out in North Bara-baraya Village and is a qualitative study on a case. The data were gathered through observation, indepth interview, focus group discussion, and document inspections.

The study reveals that the social capital exists in the BKM Surya Abadi foundation and in the religious community welfare section of Ilham Mosque Foundation. The contribution of social capital in coping with poverty are: (1) an extension of access to health services the the form of benefits for the community; (2) an extension of access to education in the form of training to increase human resources capacity; (3) an extension of access to economic support in the form of financial rolling fund, and (4) an extension of access to environment in the form of clean and green programme and environmental development. The efforts made to support social capital to cope with poverty are to institute learning in the community, to prioritise institutional role, and to strengthen the role of the head of the village to deal with poverty.

Key word: social capital, institutional, to cope with poverty

## DAFTAR ISI

	HAL
SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGANTAR .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Landasan Teori .....	11
1. Modal Sosial .....	11
2. Kemiskinan .....	25
3. Modal Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan .....	45

4. Pemberdayaan Masyarakat .....	49
B. Kerangka Konseptual .....	60
BAB III METODE PENELITIAN .....	65
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	65
B. Jenis dan Tipe penelitian .....	65
C. Pemilihan Informan .....	66
D. Jenis dan Sumber Data .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	68
F. Teknik Analisa Data .....	69
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI .....	70
A. Potensi Penggunaan Lahan .....	70
B. Potensi Sumber Daya Manusia .....	71
C. Potensi Prasarana dan Sarana .....	74
D. Keterkaitan antara Penanggulangan Kemiskinan, Potensi Kelurahan dan Modal Sosial .....	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	81
A. Bentuk dan Eksistensi Modal Sosial di Kelurahan Bara-baraya Utara .....	81
1. Kepercayaan (Trust) .....	95
2. Jaringan/ Kerjasama (Networkong) .....	98

3. Norma-norma (Shared Norm)	105
4. Solidaritas Sosial di BKM Surya Abadi dan Yayasan Mesjid Ilham	110
B. Kontribusi Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan	111
1. Kondisi Kemiskinan di Kelurahan Bara-baraya Utara	111
2. Realitas Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Bara-baraya Utara	114
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di BKM Surya Abadi Dan Yayasan Mesjid Ilham	126
C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Mendorong Modal Sosial mengatasi Masalah Kemiskinan	127
1. Proses Pembelajaran di Masyarakat	128
2. Penguatan Kelembagaan dalam Penanggulangan Kemiskinan	131
3. Peran Pemerintah Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan	135
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	137

A. Kesimpulan	.....	137
B. Saran	.....	139
DAFTAR PUSTAKA	.....	141
LAMPIRAN	.....	
Lampiran 1 Daftar Informan	.....	
Lampiran 2 Struktur Organisasi BKM Surya Abadi	.....	
Lampiran 3 Struktur Kepengurusan Yayasan Mesjid Ilham	.....	
Lampiran 4 Peta Kota Makassar	.....	
Lampiran 5 Peta Kelurahan Bara- baraya Utara	.....	

## DAFTAR TABEL

		<b>HAL</b>
Tabel 2.1	Defenisi Kapital Sosial menurut beberapa Penulis .....	19
Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar .....	72
Tabel 4.2	Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Pokok di Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar .....	73
Tabel 5.1	Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar .....	81
Tabel 5.2	Daftar Donatur Yayasan Mesjid Ilham Seksi Kesejahteraan Jamaah Tahun 2011 .....	115
Tabel 5.3	Tingkat Perkembangan Keuangan UPK BKM Surya Abadi .....	120
Tabel 5.4	Jumlah KSM dan Realisasi Masa Pinjaman Tahun 2008-2010 UPK BKM Surya Abadi .....	121

**DAFTAR GAMBAR**

		<b>HAL</b>
Gambar 5.1	Jaringan Modal Sosial di BKM Surya Abadi	102
Gambar 5.2	Jaringan Modal Sosial di Yayasan Mesjid Ilham Seksi Kesejahteraan Jamah	105
Gambar 5.3	Keterlibatan seluruh Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakekat pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, menempatkan arah pandang pembangunan sangat didasarkan pada paradigma yang mendasari para pengambil kebijakan di suatu negara untuk diimplementasikan. Perkembangan pembangunan di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh teori pertumbuhan ekonomi yang memiliki resiko pada kesenjangan pembangunan baik antar daerah, maupun antara si kaya dan si miskin. Untuk itu, dalam suatu pembangunan maka dampak negatif baik itu berupa kemiskinan maupun pengangguran merupakan faktor yang harus diselesaikan melalui skema pembangunan, bukan menjadi bagian terpisah dari pembangunan itu sendiri.

Jika dilihat dari perkembangan pembangunan di Indonesia pada awal 1970-an dan 1980-an maka fungsi "negara pembangunan" (developmental state) merupakan pilihan model pembangunan yang dilaksanakan pada saat itu. Pembangunan dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu. Dampak yang muncul dengan model tersebut semakin tingginya disparitas hasil pembangunan, karena asumsi adanya *trickle down effect* ternyata tidak

berjalan dengan sempurna. Pada pertengahan 1980-an hingga 2000-an, ciri-ciri negara pembangunan mulai bergeser menjadi negara minimalis, peran negara dalam ekonomi ditarik, dikurangi, atau dihapuskan. Kuatnya liberalisasi di banyak bidang menjadikan pasar bebas dianggap sebagai mekanisme dan kelembagaan sempurna yang dapat mengoreksi diri sendiri. Privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi menjadi kata-kata kunci dalam melakukan swastanisasi sektor-sektor pelayanan publik seperti di sektor perbankan, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, dampak negatif dari pembangunan yang terjadi pada model sebelumnya semakin bertambah banyak keluarga Indonesia jatuh miskin, sekolah menjadi mahal, kesehatan sulit dijangkau, dan lapangan kerja lebih kecil ketimbang jumlah pencari kerja.

Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan. Permasalahan kemiskinan menjadi problem sosial yang hingga saat ini belum dapat terpecahkan bagaikan lingkaran setan. Hasil data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 %), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. (*Berita Resmi Statistik BPS, No.43/07/Th.XXI, 1 Juli 2009*). Data BPS Kota Makassar menunjukkan bahwa penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa yang terdiri dari 601.304 laki-laki dan 652.352 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2007 tercatat sebanyak

1.235.239 jiwa. Pada tahun 2006 jumlah kepala keluarga miskin yang menerima raskin di Kota Makassar sebanyak 70.096. (*Makassar Dalam Angka 2008*). Tahun 2007 jumlah kepala keluarga miskin yang menerima raskin di Kota Makassar sebanyak 68.477 KK dan tahun 2008 tidak mengalami perubahan. (*Makassar Dalam Angka 2009*). Sedangkan menurut data PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2009 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 548.853 jiwa dari 58.455 kepala keluarga (*Manajemen Data PNPM MP Korkot 1 Makassar-Maros, 2010*).

Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan maka permasalahan sosial lainnya sebagai dampak kemiskinan juga bertambah, seperti: masalah lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat, dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Di samping angka kemiskinan yang disampaikan oleh BPS maka dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan *Human Development Report 2006* yang menggunakan data tahun 2002, Indonesia hanya menempati urutan ke-108 dari 177 negara, hal ini berimplikasi pada produktivitas manusia yang rendah yang pada tahun 2006 berada di peringkat ke-60 dari 61 negara pada tahun 2006 dalam *World Competitiveness Year Book*.

Akan tetapi, permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak pembangunan merupakan masalah bersama seluruh elemen anak bangsa yang harus segera ditangani. Oleh karenanya, upaya untuk tidak lagi mengandalkan sumber daya alam semata, tetapi melalui peningkatan peran manusia dalam pembangunan menduduki fungsi vital strategis. Apalagi di era otonomi daerah saat ini sebagian langkah tersebut berada di tangan pemerintah daerah. Peran daerah akan semakin dominan dan strategis dalam proses pembangunan nasional.

Pada Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut, menunjukkan bahwa faktor kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas didirikannya Negara Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan upaya bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penghapusan kemiskinan yang merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini. Hal tersebut telah disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York tahun 2000 yang menetapkan upaya mengurangi separuh dari kemiskinan di dunia sebagai Tujuan

Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*) yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui 8 jalur sasaran yang meliputi :

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Komitmen atas sasaran dan target tersebut disepakati juga oleh pemerintah Indonesia yang ikut menandatangani dokumen Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan, yang juga telah ditandatangani oleh Presiden RI, untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, bulan September 2002. Dengan demikian, konsensus bangsa Indonesia dan maupun komitmen internasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Faktor tersebut membutuhkan peran pemerintah dan semua perangkat negara bersama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggung jawab utama untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus pengentasan kemiskinan paling lambat tahun 2015.

Berbagai macam program yang telah dibuat pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi masih jauh dari harapan akan berkurangnya angka kemiskinan.

Dalam prakteknya program penanggulangan kemiskinan yang berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama banyak mengalami kendala. Sering terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi, dimana inisiatif rancangan dan proses kegiatan yang akan dikembangkan oleh masyarakat lebih banyak direncanakan serta diarahkan oleh pihak luar atau lebih didominasi oleh elit-elit masyarakat setempat, sehingga seringkali hasil yang diharapkan diwarnai persepsi pihak luar, yang mengakibatkan hasilnya tidak relevan dengan karakteristik masyarakat dan nilai terapan yang mengharap adanya proses pembelajaran bagi masyarakat dan hasil yang diperoleh berupa permasalahan dan potensi masyarakat secara murni seringkali tidak muncul. Dengan sendirinya program tersebut tidak menyentuh dan tepat sasaran yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Selain itu, juga tidak mendukung adanya proses pembelajaran masyarakat dalam pengkajian masalah dan kebutuhan, perencanaan serta pengorganisasian.

Kegagalan pendekatan program penanggulangan kemiskinan mendorong munculnya paradigma baru yang lebih menekankan pada pembangunan yang bertumpu pada komunitas. Sementara itu banyak

orang yang meragukan kemampuan komunitas dapat mengatasi masalah mereka sendiri termasuk masalah kemiskinan. Disisi lain perkembangan sistem ekonomi-politik dunia melanda negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kurun waktu sepuluh tahun disponsori oleh Bank Dunia para ahli ilmu sosial mulai memusatkan perhatian pada pengembangan studi modal sosial guna menemukan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia ketiga. Keadaan ini merupakan reaksi dari perubahan sosial mendasar sebagai dampak pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dunia melalui proses globalisasi.

Modal sosial secara sederhana dapat didefenisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. (Fukuyama dalam Soetomo, 2006:86). Jika para anggota kelompok itu masing-masing mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya maka mereka akan saling mempercayai. Dengan demikian, kepercayaan atau *trust* adalah unsur utama dalam pengertian atau konsep modal sosial.

Berdasarkan hasil penelusuran dan identifikasi dari berbagai kajian teori dan pendekatan bahwa selama ini kita mengalami krisis melemahnya modal sosial di masyarakat, walaupun dipahami sebagai salah satu faktor penting dalam mengatasi berbagai persoalan khususnya masalah pembangunan dan kemiskinan. Kontribusi (fungsi dan peran) modal sosial

yang sangat strategis dari masalah sosial belum menjadi salah satu pendekatan bahkan kebijakan dalam melakukan perencanaan serta melaksanakan pembangunan secara komprehensif. Oleh karena itu menjadi sangat relevan dan perlu dilakukan kajian yang berkaitan dengan permasalahan lemahnya modal sosial dalam masyarakat dan kontribusi modal sosial dalam mengatasi masalah khususnya kemiskinan. Situasi ini yang mendorong penulis untuk meneliti Internalisasi Modal Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa dan bagaimana eksistensi/bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat ?
2. Sejauhmana modal sosial sebagai salah satu pilar pemberdayaan masyarakat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong modal sosial mengatasi masalah kemiskinan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang internalisasi modal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa dan bagaimana eksistensi/bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi dan peran (kontribusi) modal sosial sebagai salah satu pilar pemberdayaan masyarakat mengatasi masalah kemiskinan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong modal sosial mengatasi masalah kemiskinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari kajian dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dan pengkajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber informasi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya peneliti dan bagi semua pihak yang melakukan penelitian dan kajian berkaitan dengan modal sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Hasil penelitian dan pengkajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi pemerintah dalam

pengambilan kebijakan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

3. Hasil penelitian dan pengkajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang memberikan manfaat kepada para pembaca dan menjadi salah satu referensi untuk peneliti yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Untuk menunjang penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa konsep dan teori pendukung, hasil-hasil penelitian terkait yang dapat dijadikan landasan berfikir untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain: (1) Modal Sosial, (2) Kemiskinan, (3) Modal Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan (4) Pemberdayaan Masyarakat.

##### **1. Modal Sosial**

Konsep modal sosial diperkenalkan Robert Putnam (1993: *The Prosperous Community Social Capital and Public Life*) sewaktu meneliti di Italia pada 1985. Masyarakatnya, terutama di Italia Utara, memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi karena tiap individu punya minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Hubungan antar masyarakat lebih bersifat horizontal karena semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebaliknya, Putnam menemukan kecenderungan runtuhnya jalinan sosial masyarakat Amerika Serikat (AS). Adanya televisi memberikan kontribusi bagi terciptanya *couch potato syndrome*. Kebiasaan orang AS nongkrong di depan layar televisi berjam-jam sebagai cerminan hidup yang sangat individualistik. Menurut Putnam, modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik

dalam iklim demokratis. Schaft dan Brown (2002) mengatakan modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah. (Sukowaluyo Mintorahardjo, Runtuhnya modal sosial, <http://www.unisosdem.org>, akses 21 Januari 2009 pukul 11.42).

Robert D. Putnam (1970) yang menjelaskan fenomena sosial; mengapa tindakan kolektif gagal pada sejumlah komunitas, tetapi sukses pada komunitas lainnya. Faktor penyebab kesuksesan tersebut adalah keberadaan modal sosial. Belakangan Narayan dan Wool (2000) dalam Mu'man Nuryana (2004) mendefinisikan modal sosial sebagai norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang bertindak secara kolektif. Inti definisi modal sosial adalah kemampuan dalam meningkatkan manfaat investasi modal fisik dan modal manusia.

Dalam konteks pembangunan, peranan modal sosial mulanya dapat dikatakan terpinggirkan. Tahun 1950 an dan 1960 an, hubungan sosial tradisional dan pola hidup tradisional oleh sejumlah ahli dianggap menghambat pembangunan. Akibatnya, di Indonesia pembuat kebijakan terpengaruh sehingga mengeliminasi tradisi dan adat istiadat yang dianggap menghambat pembangunan. Hingga sekarang masih banyak ahli menganggap adat-istiadat dan tradisi menghambat kemajuan. Menurut Nuryana (Peneliti Senior PUSLITBANG DEPSOS) pandangan salah tersebut dipengaruhi antara lain oleh Moore (1997), seorang

*modernizations theorist* yang mencatat *social relations* sebagai biang keladi kegagalan kapitalisme. Tahun 1970 an sejumlah ahli berpendapat bahwa hubungan sosial elit pengusaha-politikus merupakan sebuah mekanisme penting untuk mendukung keberhasilan eksploitasi kapitalisme. Sejalan dengan itu, *neoclassic* dan *public choice* tahun 1980 an dan 1990 an mengindikasi tidak ada faedah nyata dari hubungan sosial bagi pembangunan ekonomi. Belakangan teori pembangunan mulai berani menilai dengan obyektif bahwa *social relations* bermakna. (Almizar Hamid, *Potensi Modal Sosial Umat Islam Untuk Pembangunan*, <http://www.depsos.go.id> akses 20 desember 2009 pukul 21.02)

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah trust, idiologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas, dampak dari kerelaan ini akan menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial.

Modal sosial secara sederhana dapat didefenisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka (Fukuyama dalam Soetomo, 2006:86). Jika para anggota kelompok itu masing-masing mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka

mereka akan saling mempercayai. Dengan demikian, kepercayaan atau *trust* adalah unsur utama dalam pengertian atau konsep modal sosial. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien. Lebih dari itu kepercayaan atau *trust* juga dapat mendorong seseorang bersedia menggunakan hasil kerja orang atau kelompok orang lain, bahkan kepercayaan dapat juga mendorong munculnya aktivitas atau tindakan bersama yang produktif atau yang menguntungkan.

Sedangkan Isbando Rukminto Adi (2008:308) memberikan pengertian bahwa modal sosial adalah aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antarwarga masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Kepercayaan adalah *by product* yang sangat penting dari norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan modal sosial. Jika masyarakat bisa diandalkan untuk tetap menjaga komitmen, mengembangkan norma-norma saling menolong secara terhormat, dan menghindari perilaku oportunistik, maka berbagai kelompok akan terbentuk secara lebih cepat, dan kelompok yang terbentuk itu mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien (Fukuyama dalam Soetomo, 2006:87). Dari pemahaman tersebut, dapat diidentifikasi pula unsur utama yang lain dari modal sosial, yaitu unsur *reciprocal* atau timbal balik. Sudah tentu unsur timbal balik tersebut dapat dijumpai dalam bentuk saling memberi, saling

menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari proses interaksi sosial.

Oleh sebab itu, sebagai konsep sosial, di samping kedua unsur dasar yang sudah diidentifikasi sebelumnya yaitu *trust* dan *reciprocal*, maka interaksi sosial menjadi unsur yang paling awal bagi munculnya modal sosial. Interaksi yang semakin meluas akan menjadi semacam jaringan sosial yang lebih memungkinkan semakin meluasnya lingkup kepercayaan dan lingkup hubungan timbal balik. Jika kita memahami jaringan bukan sebagai tipe organisasi formal, tetapi sebagai modal sosial, kita akan memiliki wawasan yang lebih baik mengenai apakah sesungguhnya fungsi ekonomis dari jaringan tersebut (Fukuyama dalam Soetomo, 2006:88). Dilihat dari tindakan ekonomi jaringan adalah sekelompok agen individual yang berbagi nilai-nilai dan norma-norma informal melampaui nilai-nilai dan norma-norma yang penting untuk transaksi pasar biasa. Melalui paham ini kemudian dapat dijelaskan bahwa modal sosial dapat bermanfaat bukan hanya dalam aspek sosial melainkan juga aspek ekonomi.

Menurut Coleman (dalam Soetomo, 2006:88), modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama dalam berbagai kelompok dan organisasi. Selain pengetahuan dan keterampilan, potensi lain dari *human capital* adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain. Kemampuan berasosiasi ini menjadi modal penting bukan hanya pada

kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi aspek sosial yang lain. Kemampuan ini sangat bergantung dari kondisi di mana komunitas mau berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Jika titik temu etis normatis ini diperoleh, maka pada gilirannya kepentingan individu akan tunduk pada kepentingan komunitas. Dari nilai bersama ini akan tumbuh kepercayaan.

Untuk melihat aktualisasi ketiga unsur dasar modal sosial yaitu jaringan, *trust* dan *reciprocal* dalam berbagai bentuk kehidupan bersama, dapat digunakan konsep modal sosial sesuai pendapat Uphoff (dalam, Dasgupta dan Serageldin, dalam Soetomo, 2006:90). Dalam pandangan Uphoff, modal sosial dapat dilihat dalam dua kategori: fenomena struktural dan kognitif. Kategori struktural merupakan modal sosial yang terkait dengan beberapa bentuk organisasi sosial khususnya peranan, aturan, *precedent* dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas bagi kerja sama dalam bentuk tindakan bersama yang saling menguntungkan. Sedangkan modal sosial dalam kategori kognitif diderivasi dari proses mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi khususnya norma, nilai, sikap, kepercayaan yang memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kerja sama khususnya dalam bentuk tindakan bersama yang saling menguntungkan.

Bentuk-bentuk aktualisasi modal sosial baik dalam fenomena struktural maupun kognitif itulah yang perlu digali dari dalam kehidupan masyarakat, untuk selanjutnya dikembangkan dalam usaha peningkatan

taraf hidup dan kesejahteraan. Dalam kenyataannya, unsur-unsur seperti itu banyak dijumpai dalam berbagai dimensi kehidupan. Beberapa diantaranya adalah dalam kehidupan keagamaan, kehidupan masyarakat lokal-tradisional dan dalam bentuk nilai-nilai serta pranata yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yang teraktualisasi dalam bentuk semangat solidaritas, toleransi, empati dan filantropi. Dalam wacana pembangunan, Kartodirjo (dalam Soetomo, 2006:91) menyebutnya sebagai sumber daya sosial yang dalam masyarakat desa termanifestasi dalam pranata sosial, kepemimpinan dan ideologi pembangunan. Sementara Sayogyo (dalam Soetomo, 2006:91) menyebutnya sebagai energi sosial yang berdasarkan hasil penelitiannya di beberapa desa di NTT terbukti cukup besar kontribusinya bagi keberhasilan pembangunan.

Sebagaimana sudah banyak disinggung sebelumnya, karakteristik kehidupan sosial dalam sebuah komunitas adalah adanya ikatan lokalitas, solidaritas sosial, rasa saling percaya karena saling mengenal. Karakteristik tersebut menjadi semacam nilai yang mewarnai kehidupan sosial dalam komunitas yang bersangkutan. Pada umumnya, nilai dan norma tersebut difasilitasi oleh institusi lokal atau institusi tradisional yang kemudian banyak teraktualisasi dalam berbagai tindakan bersama yang saling menguntungkan termasuk tindakan bersama untuk kepentingan bersama. Apabila menggunakan pengertian yang dikembangkan Uphoff seperti yang sudah disinggung terdahulu, maka realitas dan fenomena

tersebut adalah modal sosial yang di dalamnya terkandung dimensi struktural berupa proses, prosedur dan mekanisme dan dimensi kognitif berupa nilai dan norma yang dapat menggerakkan tindakan bersama untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Dalam pemahaman ini dapat dilihat perbedaan asas lokalitas, solidaritas dan saling percaya dalam pemahaman Durkheim dengan pemahamannya sebagai kompoen modal sosial. Dalam pandangan Durkheim asas lokalitas yang melahirkan hubungan *reciprocal*, solidaritas dan saling percaya lebih dilihat sebagai komponen yang dapat memperkuat integrasi sosial dan harmoni sosial. Dalam pemahamannya sebagai modal sosial, ketiga nilai tadi tidak semata-mata menjadi instrumen untuk menegakkan integrasi sosial melainkan juga merupakan energi yang dapat mendorong tindakan bersama yang saling menguntungkan baik dilihat secara ekonomis maupun sosial dan kultural.

Semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan membangun masyarakat. Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan mereka, dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, pemahaman dan aksi sosial. Hilangnya komunitas telah mengakibatkan perpecahan, isolasi dan individualisasi, dan pengembangan masyarakat sangat diperlukan jika pembentukan struktur dan proses level

masyarakat yang baik dan langgeng ingin dicapai (Putnam dalam Ife, 2008: 363).

Inti defenisi kapital sosial menurut beberapa penulis ( Lawang, 2004: 178) yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Defenisi Kapital Sosial menurut beberapa Penulis**

<b>Penulis</b>	<b>Tertambat pada</b>	<b>Kapital sosial (independen)</b>	<b>Variabel dependen</b>
Coleman	Struktur sosial: Hubungan sosial, institusi	Fungsi kewajiban, harapan, layak percaya; saluran; norma, sanksi; jaringan, organisasi	Tindakan actor atau aktor dalam badan hokum
Putnam	Institusi sosial	Jaringan; norma; kepercayaan	Keberhasilan ekonomi, demokrasi
Fukuyama	Agama, filsafat	Kepercayaan, nilai	Kerjasama, keberhasilan ekonomi
Bank Dunia		Institusi, norma, hubungan	Tindakan social
Turner	Hubungan sosial, pola organisasi yang diciptakan individu	Kekuatan	Potensi perkembangan ekonomi
Lawang	Struktur sosial mikro, mezzo, makro	Kekuatan sosial komunitas bersama kapital-kapital lainnya	Efisiensi dan efektifitas dalam pengentasan masalah

### **Konsep-konsep Dasar Modal Sosial**

Tentu saja konsep yang digunakan dalam kapital sosial ada banyak. Yang dikemukakan disini hanya yang inti-inti saja. Konsep intinya terdiri dari kepercayaan, norma dan jaringan. Sedangkan konsep-konsep tambahan terdiri dari tindakan sosial, interaksi sosial dan sikap. (Lawang, 2004:36)

#### a. Kepercayaan

*Trust* dalam bahasa Inggris memang merupakan kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda *trust* berarti kepercayaan, keyakinan atau juga rasa percaya. Sedangkan kata kerja, *trust* berarti proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya. Inti kepercayaan antar manusia ada tiga hal yang saling terkait : (i) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam pengertian ini diwakili orang. (ii) Harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. (iii) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. Dengan ketiga dasar itu pula, kepercayaan yang dimaksudkan disini menunjuk pada hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial.

#### b. Norma

Norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Kalau struktur jaringan itu terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang. Sifat norma kurang lebih sebagai berikut :

*Pertama*, norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan (Blau 1963, Fukuyama 1999). Artinya kalau dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Karena itu norma yang muncul disini, bukan sekali jadi melalui satu pertukaran saja. Kalau

dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan, akan muncul pertukaran yang kedua, dengan harapan akan memperoleh keuntungan pula (Homans 1974). Kalau dari beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan dipegang teguh, dari situlah muncullah norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan dari pertukaran itu. Dengan cara demikian hubungan pertukaran itu dipelihara (Blau). *Kedua*, norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, orang yang melanggar norma resiprokal yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak, akan diberi sanksi negatif yang sangat keras. *Ketiga*, jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan. Yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras pula (Blau).

#### c. Jaringan

Dalam pembahasan para ahli, jaringan dan fungsinya terhadap pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari kepercayaan. Jaringan itu terjemahan dari *network*, yang kalau diberi arti secara etimologik mungkin malah lebih jelas. Dasarnya adalah jaring (seperti anda bayangkan jala) yang berhubungan satu sama lain melalui simpul-simpul (ikatan). Dasar ini (*net*) ditambah atau digabung dengan kerja (*work*). Kalau digabung itu diberi arti maka tekanannya ada pada kerjanya, bukan pada jaringannya,

sehingga muncullah arti: kerja (bekerja) dalam hubungan antara simpul-simpul seperti halnya jaring (*net*). Kerja jaring (jaringan) kalau dipakai sebagai analogi untuk menjelaskan jaringan yang digunakan dalam teori kapital sosial, artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Pertama* ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan, boleh dalam bentuk strategik, boleh pula dalam bentuk moralistik. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. *Kedua* ada kerja antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama. Kepercayaan simbiotik bilateral dan kepercayaan interpersonal masuk dalam kategori ini. *Ketiga* seperti halnya sebuah jarring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar simpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak. Dalam hal ini analoginya mungkin kurang jelas dan tepat, karena jaringan dalam kapital sosial bisa terjadi hanya antara dua orang saja. *Keempat* dalam kerja jaring itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Malah kalau satu simpul saja putus, maka keseluruhan jaring itu tidak bisa berfungsi lagi, sampai simpul itu diperbaiki lagi. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini, analogi tidak seluruhnya tepat, terutama kalau orang yang membentuk jaringan itu hanya dua saja. *Kelima* (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat

dipisahkan. *Keenam* Ikatan atau pengikat (simpul) dalam kapital sosial adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan mediana itu dipelihara dan dipertahankan.

Bagaimana jaringan sosial itu dibentuk atau terbentuk ? Jaringan pasti masuk dalam kategori kepercayaan strategik. Artinya melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah. Jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama pembentukan kepercayaan strategik. Media yang paling ampuh untuk membuka jaringan adalah pergaulan dalam pengertian umum dengan membuka diri lewat media cetak atau elektronik, atau dalam pengertian terbatas seperti pergaulan. Jaringan yang dibahas dalam kapital sosial, menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan pengatasan masalah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Inti defenisi ini pada dasarnya mengacu pada prinsip sosial: bekerjasama lebih mudah mengatasi masalah daripada bekerja sendiri. Defenisi ini bisa relevan untuk kegiatan ekonomik dan non ekonomik.

Modal sosial berlangsung melalui: aliran informasi (contoh pembelajaran keahlian kerja, pertukaran ide di kampus dsb), norma hubungan timbal balik atau kerjasama mutual (menghubungkan masyarakat sejenis yang berlangsung terus menerus), tindakan kolektif (contoh peran yang dimainkan gereja kaum hitam dalam memperjuangkan

hak-hak sipil), solidaritas yang didukung hubungan sosial yang menerjemahkan mentalitas Aku; menjadi mentalitas Kami. Contoh modal sosial dalam kehidupan sehari-hari: masyarakat tingkat Rukun Tetangga di sebuah pemukiman yang secara informal mengawasi rumah tetangganya ketika musim mudik Lebaran, ini adalah modal sosial yang dilakukan dalam bentuk tindakan. Atau saat kebakaran melanda pasar Tanah Abang, Jakarta, paguyuban keluarga Minang misalnya, membuka Pos Kemanusiaan (sekaligus pos pemulihan ekonomi) bagi pedagang korban kebakaran asal Minang atau orang Minang.

Contoh modal sosial lainnya dapat ditemukan dalam jaringan pertemanan, pertetangga, masjid, sekolah, asosiasi warga masyarakat, klub bela diri dan sebagainya. Motto dimana setiap orang tahu nama anda menangkap satu aspek penting dari modal sosial. Dampak modal sosial memberi efek pada transaksi ekonomi, produksi, loyalitas dan kesediaan untuk menanggung resiko bahkan bencana yang besar.

Modal sosial selain mempunyai sisi positif juga memiliki sisi negatif. Modal sosial dapat menjadi suatu perangkap dan alat yang berpengaruh kuat terhadap terjadinya ketidakkmajuan bahkan pemiskinan seseorang atau sekelompok orang. Modal sosial dapat menjadi suatu pembatas sosial bagi seseorang untuk keluar atau masuk dari suatu kelompok. Kegiatan-kegiatan kolusi dan nepotisme pun seringkali lahir karena orang cenderung menggunakan relasi-relasi primordial. Sisi negatif lain dari modal sosial adalah biaya. Biaya-biaya ini merupakan konsekuensi dari

pemeliharaan kebersamaan dan ikatan dalam kelompok. Dalam kasus-kasus tertentu seperti sindikat mafia, biaya yang harus ditanggung bahkan berupa nyawa atas kesetiaan terhadap kelompok. Sisi gelap modal sosial juga ditujukan pada kelompok atau jaringan yang punya tujuan yang berlawanan dengan tujuan masyarakat umum (contoh kartel narkoba, sindikat penipuan dsb). (Sumber <http://www.masyarakatmandiri.org>, akses 19 Januari 2010 pukul 23.13).

## **2. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam membahas masalah ini adalah mengidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda pula. Setelah itu, dicari faktor-faktor dominan (baik bersifat kultural maupun struktural) yang menyebabkan kemiskinan. Langkah berikutnya mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem itu (strategi mengentaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan)

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Menurut Soekanto (2000:406) kemiskinan adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf

hidup kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut Kartasasmita (1996:234) kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Masih menurut Kartasasmita (1996:235) mengutarakan sejumlah perbedaan tentang kemiskinan di suatu daerah berdasarkan pola waktu diantaranya sebagai berikut:

1. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi.
2. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.
4. *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Selain berdasarkan pola waktu, Kartasasmita

(1996:235) mengutarakan kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemiskinan absolut, yaitu seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut. Kriteria yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan tersebut adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori perkapita per hari ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan yang meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama.
- b. Kemiskinan relatif, yaitu keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi sosial yang dapat menyebabkan lemahnya fisik dan mental manusia yang tentunya berdampak negatif terhadap lingkungan pembangunan di negara yang sedang berkembang.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain.

Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Menurut Kartasasmita (1996:240) mengutarakan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya:

1. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri yang terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
4. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Sanjeev Prakash, Deepa Narayan dalam beberapa penelitian yang disponsori oleh World Bank menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan jebakan kemiskinan mengalami keberlanjutan adalah (1)

kondisi geografi yang terisolasi; (2) kurangnya akses terhadap pendidikan; (3) diskriminasi yang berkepanjangan terhadap kelompok-kelompok minoritas (*Sense of voicelessness and powerlessness in the institutions of state and society*).

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari asset ini bergantung pula dari berbagai hal, *pertama* adalah akses terhadap market; *kedua*, akses serta dukungan dari lembaga pemerintah dan masyarakat; *ketiga*, akses serta dukungan politik dan sosial; dan *keempat*, adalah akses ini dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya diskriminasi, baik diskriminasi gender, etnis, ras atau status sosial.

Ketiadaan akses ini diperparah dengan "*their lack of voice, power, and independence*". Ketidakberdayaan ini menjadikan orang miskin menjadi sasaran kekerasan, dipermalukan, perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi atas nama lembaga pemerintahan maupun sosial. Tidak adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap kekerasan, munculnya intimidasi, dan berbagai macam ketidakpastian layanan publik dari pemerintah semakin membebani bagi masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan menghalangi penduduk miskin untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai macam kesempatan atau beraktifitas dengan kelompok sosialnya di luar zona keamanan mereka.

Dalam masyarakat agraris, penduduk miskin tidak memiliki aset dan pendapatan tetap, yang menyebabkan mereka terikat hubungan dengan pemilik lahan dalam bentuk hubungan patron-klien. Norma-norma

sosial dan berbagai macam batasan juga memiliki peran yang menyebabkan penduduk miskin semakin *voicelessness* dan *powerlessness*.

Kriteria penduduk miskin di Indonesia memiliki beberapa versi, tergantung dari instansi yang menjadi rujukan. BKKBN menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi dalam mendefinisikan kriteria bagi masyarakat miskin, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya;
- b. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan 2 kali sehari;
- c. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian;
- d. Bagian terluas dari rumah berlantaikan tanah;
- e. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk memepertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak

dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*based needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subyective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang didalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan

pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), 1985).

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya. Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh Bappenas berikut ini:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004);
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya

layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;

3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung;
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga;
5. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran

hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai;

6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air;
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian;
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;
9. Lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari

1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;

10. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus pengusiran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;

11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di pedesaan adalah 4 orang.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4)

terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Untuk menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Soeharto (2005:132-133), membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

*Pertama:* kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang yang kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju. Sedangkan Negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. *Kedua,* kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan

perkotaan). *Ketiga*, kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. *Keempat*, kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Dimensi kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. (Suharto,2005:135).

*Faktor internal* datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya.

*Faktor eksternal* datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmampuan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan”

sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Menurut Emil Salim (dalam Supriatna, 2000:124) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, kelima karakteristik kemiskinan tersebut adalah: (a) Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, (b) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, (c) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, (d) Banyak di antara mereka tidak mempunyai fasilitas, (e) Di antara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Townsend (dalam Usman, 2008:125) menjelaskan paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardsick*). Ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan.

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan

daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgment*) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.

Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak menganal *a fixed yardstick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*. Kelompok yang menurut ukuran kita berbeda di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin (dan demikian pula sebaliknya). Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri semacam itu (dan demikian pula sebaliknya). Oleh karena itu, konsep kemiskinan semacam ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategis yang efektif untuk penanggulangannya.

Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan upaya memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan. Kartasasmita (1996:241-242) menuangkan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam tiga arah: *Pertama*, kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan, *kedua*, kebijakan langsung yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dan *ketiga*, kebijaksanaan khusus

yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Sedangkan Salman (2005:96-97), mengusulkan dalam upaya reduksi kemiskinan di masa mendatang diperlukan perspektif baru yang mencakup beberapa point, yaitu : *pertama*, bahwa upaya reduksi kemiskinan hendaknya diarahkan pada pencapaian ditingkat rakyat miskin yang tidak hanya bermakna keluarnya mereka dari kemiskinan secara temporer, melainkan juga bermakna pada penciptaan kemampuan bagi mereka untuk secara mandiri mengatasi masalah dan keluar dari krisis ketika terjadi perubahan kondisi yang menggiringnya kembali pada situasi miskin. Ini berarti bahwa upaya reduksi kemiskinan harus terfokus pada peningkatan kapabilitas (*capability building*) ditingkat individu dan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*) ditingkat struktur dan sistem pada sebuah komunitas miskin sebelum adanya penghantaran tambahan sumberdaya (*additional resources*) sehingga menciptakan efek belajar berdasarkan pengalaman (*experienced based learning process*) kepada rakyat miskin.

*Kedua*, terkait dengan point pertama, itu berarti bahwa dalam upaya reduksi kemiskinan, persiapan sosial dan penambahan sumberdaya sama pentingnya implikasinya, pembenahan pada tingkat sistem penghantaran (*delivery system*) dan mekanisme penerimaan

(*receiving mechanism*) harus diperlakukan sama pentingnya. Pada tingkat *delivery system*, terkait pembenahan pada sistem penghantaran sumberdaya kepada rakyat miskin yang diperlakukan oleh pengelola program/proyek reduksi kemiskinan. Disini tercakup agenda penciptaan *accountability*, *tranparancy*, *participatory* dan *rule of law* dalam pengelolaan program/proyek reduksi kemiskinan.

Pada tingkat *receiving mechanism*, terkait pembenahan terhadap mekanisme penerimaan atas tambahan sumberdaya yang datang dari luar, agar pengelolaan sumberdaya tersebut tidak hanya berefek pada perbaikan kehidupan ekonomi secara sesaat, melainkan juga berefek pada *capability building* dan *institutional strengthening* bagi rakyat miskin. Dalam hal ini peranan LSM dalam penyadaran dan pengorganisasian masyarakat akan sangat menentukan, tetapi tidak menutup kemungkinan peranan dari aparat garis depan.

Gunawan dan Sugiyanto pada penelitian Kondisi Fakir Miskin merupakan penelitian kasus di 17 propinsi, mengatakan dalam konteks penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin tidak hanya didekati sebagai *obyek* (gejala yang diamati), tetapi harus dipandang sebagai subjek atau pelaku yang dikelompokkan dalam golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu,

dalam kerangka memahami potensi keluarga miskin, paling tidak terdapat tiga bentuk potensi yang diamati, yakni:

*Pertama*, Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tinjauan tentang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan akan dilihat dari aspek (1) pengeluaran keluarga, (2) *human capital* atau kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan (3) *security capital* atau kemampuan menjangkau perlindungan dasar.

*Kedua*, Kemampuan dalam pelaksanaan peran sosial, tinjauan tentang kemampuan peran sosial akan dilihat dari (1) kegiatan utama dalam mencari nafkah, (2) peran dalam bidang pendidikan, (3) peran dalam bidang perlindungan, dan (4) peran dalam bidang kemasyarakatan.

*Ketiga*, Kemampuan dalam menghadapi permasalahan, tinjauan tentang kemampuan dalam menghadapi permasalahan, akan dilihat dari upaya mereka lakukan untuk mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Dari berbagai uraian tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini dapat dirumuskan dengan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayahnya. Masyarakat sesungguhnya paham akan kondisi ketidakberdayaan mereka, namun tidak diberi kesempatan dalam memutuskan sendiri.

Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dimana inisiatif rancangan dan proses kegiatan yang akan dikembangkan oleh

masyarakat lebih banyak direncanakan masyarakat setempat, dengan karakteristik masyarakat dan nilai terapan yang mengharapkan adanya proses pembelajaran bagi masyarakat dan hasil yang diperoleh berupa permasalahan dan potensi masyarakat secara murni. Dengan sendirinya program tersebut menyentuh dan tepat sasaran yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Selain itu, juga mendukung adanya proses pembelajaran masyarakat dalam pengkajian masalah dan kebutuhan, perencanaan serta pengorganisasian.

Upaya penanggulangan kemiskinan dengan pelibatan seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan), karena sesungguhnya penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Selain itu membangun kemitraan dengan pihak luar sangat mendorong dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

### **3. Modal Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**

Dari pembahasan mengenai modal sosial, diketahui bahwa modal sosial selain bersifat inklusif, namun juga bisa menjadi eksklusif pada level tertentu, sehingga menjadi barrier bagi anggota masyarakat di luar kelompoknya untuk bisa bergabung dan berpartisipasi.

Dari berbagai pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, diketahui bahwa banyak manfaat dari keberadaan modal sosial dalam masyarakat. Eksistensi modal sosial memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat tersebut antara lain:

*Pertama*, dalam kinerja ekonomi, modal sosial mengurangi biaya transaksi dengan mengubah istilah-istilah dalam perdagangan; mengurangi secara besar-besaran biaya pengaturan kontrak; pengambilan keputusan yang lebih fleksibel; dan menghemat waktu (P.N. Wilson, 2000). Dengan kata lain, *trust*, reputasi dan sanksi informal merupakan pengganti yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem legalitas dan sanksi formal. Sebagai contoh ketika orang-orang mempercayai dan dapat dipercaya, dan memelihara hubungan secara terus menerus, kegiatan bisnis harian menjadi lebih mudah dan bebas tekanan. Lebih lanjut, Putnam (2000) menambahkan bahwa jaringan sosial juga sebagai penyalur informasi yang berguna bagi pencapaian tujuan individual maupun kelompok. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki jaringan sosial yang bagus, akan memperoleh informasi lebih dahulu, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki jaringan sosial.

*Kedua*, berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, modal sosial memiliki dampak positif terhadap kesehatan, dan terutama kesehatan mental, jaringan sosial yang dimiliki oleh individu adalah sebagai pelindung dari masalah-masalah kehidupan. Penelitian ini telah dilakukan oleh Durkheim berkaitan dengan studi bunuh diri, dimana ditemukan korelasi antara modal sosial dan kesehatan. Kesimpulannya adalah "*suicide varies inversely with the degree of integration of the social groups of which the individual forms a part*" (Halpern, 2005:74)

*Ketiga*, berkaitan dengan kejahatan, Halpern (2005:114) menegaskan bahwa “*social capital focuses attention on the potential influence of social relationships, cooperative norms and informal sanctions on offending behavior*”. Modal sosial menjembatani pandangan mengenai kriminologi antara pendekatan psikologi dan sosiologi (Halpern, 2005). Modal sosial dapat memelihara norma-norma sosial dalam suatu komunitas dan mengurangi kecenderungan perilaku egois diantara anggota kelompok.

Orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan komunitasnya dan memiliki hubungan saling mempercayai, pada umumnya memiliki perilaku yang dapat diterima oleh kelompoknya.

*Keempat*, berkaitan dengan pemerintah dan pemerintahan, hasil penelitian Putnam (1993) di Italia menyimpulkan bahwa “*the differences in government effectiveness arose from the character of the associational life of the regions and patterns of trust. The causal direction appeared clear—strong associational life and high levels of public trust led to more effective government*”.

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang multikultur dimana anggota masyarakat sangat terikat dengan kelompoknya dan memiliki komitmen yang kuat berdasarkan kesamaan suku, budaya, atau kesamaan kepentingan bagi kelompoknya saja, bukan demi kepentingan nasional, pada saat itu maka terjadi degradasi budaya politik nasional (Fukuyama, 1995; Daniel et al, 2003). Komunitas seperti ini tidak akan

memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Komunitas-komunitas seperti ini biasanya mendorong bertumbuh kembangnya *trust* secara internal, dan menyebarluaskan kebencian kepada komunitas-komunitas selain mereka. Sebagai contoh adalah organisasi-organisasi teroris, kelompok kejahatan yang terorganisasi.

Seringkali dampak negatif dari modal sosial diperlihatkan dalam wujud kekerasan, hubungan yang sangat kuat dalam internal kelompok, yang tidak berlaku bagi masyarakat luas di luar kelompoknya, dan menjalankan nilai-nilai korupsi dan kroni (Evans, 1989; Mauro, 1995; World Bank, 1997), serta nepotisme (Fukuyama, 1995).

Jika konsep modal sosial digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, keterbatasan kapasitas dari efektivitas jaringan kerja (*networks*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin harus menjadi perhatian. *Networks* yang dimiliki masyarakat miskin tentu saja berbeda dengan *networks* yang dimiliki oleh masyarakat mampu, dan seringkali masyarakat miskin tidak diijinkan untuk bergabung dan terlibat dalam *networks* masyarakat mampu. Sebagai catatan, stratifikasi dalam kelas-kelas sosial terdapat pada seluruh kelompok masyarakat dimana masyarakat miskin berada pada level terbawah dari hirarki sosial, dan mengalami *social exclusion*.

Lembaga-lembaga sosial sistem kekeluargaan, organisasi-organisasi masyarakat, dan jaringan-jaringan informal sangat mempengaruhi terhadap *outcomes* kemiskinan. Lembaga-lembaga sosial

tersebut memiliki pengaruh terhadap aset-aset ekonomi, strategi dalam menyelesaikan masalah, memiliki kapasitas dalam meraih keuntungan, dan memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan. Disatu sisi lembaga-lembaga sosial ini bisa menolong orang miskin, namun mereka juga bisa menjadi penghalang bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, masyarakat miskin memiliki modal sosial dalam level *bonding* melibatkan keluarga, kekerabatan, jaringan komunitas yang membantu dalam upaya strategi manajemen resiko yang cukup penting. Namun, mereka tidak memiliki modal sosial dalam level *bridging*, apalagi *linking*. Membentuk format *bridging* dan *linking* bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk melibatkan mereka dalam struktur kekuasaan.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Dinamika perubahan dan pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berlandaskan keadilan. Dalam pembangunan yang makin kompleks, masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dan turut merumuskan jalan pemecahannya, sehingga peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan dan

berimplikasi pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Kearifan pembangunan yang mendasarkan pada logika *production centered development* telah mendorong lahirnya logika pembangunan yang mendasarkan pada *human centered development* (Tjokrowinoto, 2004:45). Lebih lanjut ditegaskan bahwa pembangunan yang mendasarkan pada logika *human centered development* menjadikan manusia sebagai fokus utama pembangunan, dan aktualisasi potensi di dalam berbagai dimensinya sebagai nilai yang harus diwujudkan melalui proses pembangunan.

Paradigma ini memberikan peranan kepada individu agar tidak lagi terperangkap sebagai obyek, tetapi mejadi pelaku utama (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber pembangunan, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal yang menentukan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisasi diri mereka sendiri (Sumodiningrat,1996).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pengembangan sumber daya manusia menekankan pentingnya “pemampuan” (*empowerment*) manusia,

kemampuan untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. Proses ini menumbuhkan apa yang disebut *conscientization* manusia, kesadaran akan kehadirannya (*self-hood*), yang memungkinkan mereka untuk secara kritis melihat situasi sosial yang melingkupinya (Tjokrowinoto,2004:29).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karena, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekusaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto dalam Suharto, 2005: 58-59):

- a. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (ife, 1995).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994).

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport. 1984).

Upaya memberdayakan masyarakat, diperlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan dari pihak yang sudah maju kepada pihak yang belum berkembang. Dalam konteks ini, Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada kemandirian. Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi, menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan. Pandangan ini muncul sebagai tanggapan atas terjadinya kesenjangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan dalam konteks ini dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyesuaian berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang, dan *ketiga*, melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Dimensi di atas sejalan dengan pemikiran Pranaka dan Moeljito (1996) yang menempatkan manusia atau masyarakat sebagai sebagai subyek (pelaku) sehingga memunculkan makna : *pertama*, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat pula dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi. Kecenderungan dalam

konteks ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

*Kedua*, proses pemberdayaan menekankan pada upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menemukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog, sehingga kecenderungan ini dapat dipahami sebagai kecenderungan yang bersifat sekunder.

Narayan (2002:14) mendefinisikan pemberdayaan sebagai peningkatan kemampuan dan asset masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi dan menuntut pertanggungjawaban dari lembaga yang mempengaruhi hidup mereka. Lebih jauh, Friedmann (dalam Priyono dan Pranaka, 1996:61) mengemukakan bahwa masyarakat menempatkan 3 (tiga) kekuatan sebagai sumber utama pemberdayaan, yakni sosial, politik dan psikologis. Kekuatan sosial menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu masyarakat, misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber-sumber keuangan. Apabila ekonomi masyarakat tersebut meningkat aksesnya pada dasar-dasar produksi di atas, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat. Peningkatan kekuatan sosial dapat dimengerti sebagai suatu peningkatan akses masyarakat terhadap dasar-dasar kekayaan produktif mereka.

Kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan, terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Kekuatan politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga kekuatan untuk menjadi vocal dan bertindak secara kolektif. Pengaruh politik yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu "*meninggi*" sebagai pengaruh dari partisipasi individu terhadap basis lokal maupun personal, melainkan juga pada saat suara tersebut didengungkan bersama-sama dengan suara-suara asosiasi-asosiasi politik yang lebih luas, misalnya partai, gerakan sosial, atau kelompok yang berkepentingan.

Selain kedua kekuatan yang dikemukakan di atas, masyarakat juga mengandalkan eksistensinya dengan kekuatan psikologis. Kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan perilaku percaya diri. Pemberdayaan psikologis seringkali tampak sebagai suatu keberhasilan dalam komponen sosial politik. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif dan kursif terhadap perjuangan masyarakat yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

Dalam konteks tersebut *people centered development*, menempatkan pemberdayaan di dalam 2 (dua) makna utama, yaitu *capability building* dan *institutional strengthening* (Ohama, 2001 dalam Salman,2005:25). Selanjutnya dikatakan bahwa upaya pemberdayaan

ditempuh melalui penyadaran, pengorganisasian dan penghantaran sumberdaya.

Penyadaran adalah proses memfasilitasi penanaman kesadaran kritis dan kepekaan kepada masyarakat untuk: (1) klarifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan dalam hidup sehari-hari mereka, (2) pemahaman mengenai saling hubungan antar masalah dengan struktur sosial mereka, (3) refleksi kritis mengenai hakekat dari potensi dan hambatan dari segi sumberdaya, relasi sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan masalah mereka, (4) gambaran kongkrit tentang sebuah struktur sosial alternatif yang memungkinkan direkonstruksi, (5) pengakuan akan perlunya aksi kolektif bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan. Hasilnya adalah lahirnya pengakuan atas pola masyarakat lama yang mengkonstruksi kemiskinan dan lahirnya sebuah visi untuk perwujudan masyarakat alternatif yang terbebas dari kemiskinan.

Pengorganisasian adalah pembentukan dan pengembangan organisasi dalam komunitas sebagai: (1) arena partisipasi warga komunitas, saling konsultasi serta tukar pengalaman, dan pengambilan keputusan kolektif, (2) arena pelatihan kepemimpinan yang berorientasi prestasi serta penanaman jenis kelakuan yang berpihak pada kepentingan kolektif, (3) arena pelatihan berbasis pengalaman untuk manajemen diri secara kolektif, (4) arena pelatihan bagi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan, (5) perlengkapan sosial untuk mengakumulasi pengalaman dari aksi dan manajemen kolektif. Hasilnya adalah

terbentuknya kerangka substansial untuk internalisasi nilai-nilai dan hubungan sosial alternatif dalam komunitas lokal.

Penghantaran sumberdaya adalah proses penghantaran tambahan sumberdaya ke dalam komunitas berupa : (1) pemberian bantuan modal untuk mencukupi kebutuhan dan menstimulasi kebutuhan ekonomi, (2) penyuluhan teknologi tepat guna untuk peningkatan keterampilan yang relevan, (3) pelatihan manajerial untuk meningkatkan kinerja pengelolaan usaha, (4) pelibatan tenaga ekspert untuk mendampingi komunitas bagi akses pengetahuan dan keterampilan teknis. Hasilnya adalah terpenuhinya kekurangan sumberdaya dalam komunitas yang norma pengelolaannya ditentukan oleh mekanisme konsultasi warga komunitas dan wadah pengelolaannya melalui organisasi milik masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Ndraha (2000,147-148) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan desa dan masyarakat desa sebagai reformasi manajemen desa harus dilakukan di segala bidang, yakni politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pemberdayaan politik desa dalam konteks ini diartikan sebagai pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumeristik dan kontrol sosial desa terhadap produk-produk pemerintahan dan pembangunan, sedangkan di sisi lain hal itu diartikan sebagai kewenangan desa untuk “mempengaruhi masa depannya” melalui partisipasi proaktif dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Riyadi dan Bratakusumah (2005) mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program pembangunan dapat diciptakan, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: (1) merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan, (2) dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan, dengan pendampingan dari lembaga advokasi masyarakat, (3) merancang pertemuan seluruh stakeholders untuk membicarakan *cost and benefit* dari pelaksanaan kegiatan, (4) memilih tokoh masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya, (5) proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, disamping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD, (6) mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati, (7) melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya tolak ukur keberhasilan pengembangan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) perbaikan dan peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa telah berhasil, (2) termotivasinya masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya

sendiri, (3) tumbuhnya kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri (Ndraha,2000).

Berdasarkan konsep-konsep pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh para pemikir tersebut, maka pemberdayaan masyarakat dapat dinamakan sebagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan penguatan kelembagaan masyarakat agar mampu mengakses dan mengelola sumberdaya secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil yang dapat dicapai dari upaya pemberdayaan adalah tumbuhnya kesadaran diri manusia, sehingga memungkinkannya untuk berperan serta dalam membentuk proses sejarah dalam wujudnya tidak hanya sekedar menjadi obyek pembangunan sekaligus menjadi pelaku pembangunan secara umum diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan pada akhirnya tambahan sumberdaya yang diperoleh akan dimanifestasikan dalam bentuk kemandirian masyarakat.

## **B. Kerangka Konseptual**

Dari berbagai pendekatan teoritis tersebut di atas, maka penulis merumuskan kerangka konseptual agar lebih memudahkan dalam penelitian.

Berdasarkan konsep-konsep pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh para pemikir tersebut, maka pemberdayaan masyarakat dapat dinamakan sebagai upaya yang ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan dan penguatan kelembagaan masyarakat agar mampu mengakses dan mengelola sumberdaya secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil yang dapat dicapai dari upaya pemberdayaan adalah tumbuhnya kesadaran diri manusia, sehingga memungkinkannya untuk berperan serta dalam membentuk proses sejarah dalam wujudnya tidak hanya sekedar menjadi obyek pembangunan sekaligus menjadi pelaku pembangunan secara umum diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan pada akhirnya tambahan sumberdaya yang diperoleh akan dimanifestasikan dalam bentuk kemandirian masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini dapat dirumuskan dengan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayahnya. Masyarakat sesungguhnya paham akan kondisi ketidakberdayaan mereka, namun tidak diberi kesempatan dalam memutuskan sendiri.

Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dimana inisiatif rancangan dan proses kegiatan yang akan dikembangkan oleh masyarakat lebih banyak direncanakan masyarakat setempat, dengan karakteristik masyarakat dan nilai terapan yang mengharapkan adanya proses pembelajaran bagi masyarakat dan hasil yang diperoleh berupa permasalahan dan potensi masyarakat secara murni. Dengan sendirinya program tersebut menyentuh dan tepat sasaran yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Selain itu, juga mendukung adanya proses

pembelajaran masyarakat dalam pengkajian masalah dan kebutuhan, perencanaan serta pengorganisasian.

Upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan), karena sesungguhnya penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Selain itu membangun kemitraan dengan pihak luar sangat mendorong dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, modal sosial sangat berkontribusi dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

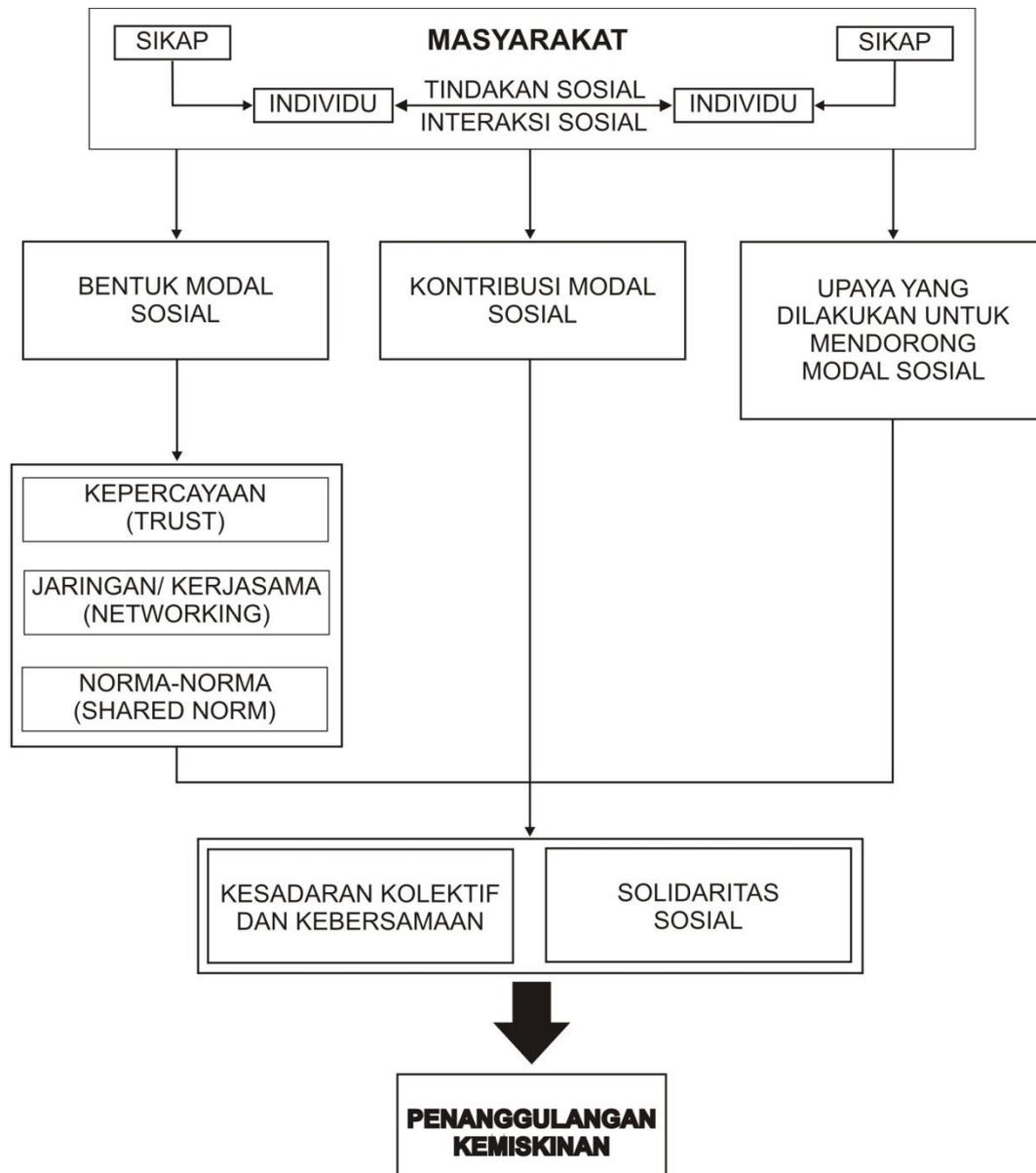
Berikut penulis mencoba menjelaskan hubungan antara kolom yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara satu kolom lebih menjelaskan tentang alur pemikiran dilihat dari garis panah yang menghubungkan antara satu kolom ke kolom yang lainnya.

Pada proses pemberdayaan masyarakat, internalisasi modal sosial memberikan kontribusi dimana terjadi proses penanaman nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Dalam melakukan interaksi sosial tindakan sosial masyarakat banyak dipengaruhi oleh sikap masing-masing individu. Diharapkan ketika terjadi interaksi sosial maka akan mendorong sikap di dalam masyarakat untuk saling kerjasama, percaya berdasarkan nilai-nilai yang sudah dianut. Unsur dasar dari modal sosial itu sendiri yaitu kepercayaan (*trust*),

Jaringan/Kerjasama (Networking) dan Norma-norma (Shared Norms). Ketiga unsur dasar modal sosial tersebut diharapkan telah terjadi proses internalisasi di dalam masyarakat, sehingga nantinya akan memperkuat kesadaran kolektif dan kebersamaan masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial. Kesadaran kolektif dan kebersamaan masyarakat, serta solidaritas sosial yang kuat dapat mendorong proses penanggulangan kemiskinan.

Secara singkat dijelaskan dalam bentuk skema pemikiran sebagai berikut:

## KERANGKA KONSEPTUAL



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar. Kelurahan tersebut masih dianggap mempertahankan prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan. Sekarang sementara mengelola program penanggulangan kemiskinan dengan indikator berhasil dalam mengelola kegiatan ekonomi bergulir dengan tingkat pengembalian diatas rata-rata 90% per bulan. Selain itu Kelurahan Bara-baraya Utara berada pada wilayah pusat kota yang bisa dikategorikan wilayah urban. Alasan tersebut sehingga penulis tertarik memilih lokasi penelitian tersebut dibandingkan dengan kelurahan lain yang mengelola program yang sama tetapi kemampuan pengelolaan ekonomi bergulirnya lemah dan bahkan macet.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Desember 2010.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi sebanyak mungkin tentang masalah pokok yang dibahas. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif bertujuan menggambarkan secara objektif dan apa

adanya tentang internalisasi modal sosial sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan.

### **C. Pemilihan Informan**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penelitian ini merupakan studi kasus, dengan tipe penelitian deskriptif, maka untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan perlu ditentukan informan. Beberapa orang dari anggota masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara yang dipilih sebagai informan, yang dipandang mampu dan memiliki pengetahuan yang luas menyangkut data penelitian, terbuka dan dapat dipercaya, memiliki kepedulian sosial, serta mempunyai kesiapan waktu.

Penelitian ini dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci, antara lain: Lurah, Perwakilan dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Perwakilan dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Perwakilan dari RT/RW, Perwakilan dari tokoh masyarakat, Perwakilan dari tokoh agama, Perwakilan dari tokoh pemuda, Perwakilan dari kelompok peduli, Perwakilan dari warga miskin dan Perwakilan dari beberapa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) .

#### Tahapan penentuan informan

- a. Dengan bertemu key informan dalam hal ini Lurah, Tokoh-tokoh Masyarakat atau orang yang berhubungan langsung dengan informan.
- b. Informan selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk key informan sehingga tercapai yang memungkinkan terjaringnya informasi yang diperlukan secara lebih luas.

Dalam perkembangan penelitian, jika masih dianggap perlu mendapatkan data informan kunci maka tidak menutup kemungkinan akan menambah informan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari informan penelitian. Jenis data yang dikumpulkan antara lain: (1) Apa dan bagaimana eksistensi/bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat, (2) Sejauhmana modal sosial sebagai salah satu pilar pemberdayaan masyarakat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan, (3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong modal sosial mengatasi masalah kemiskinan. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui buku-buku literatur dan membuka kembali dokumen-dokumen hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan antara lain data lokasi penelitian, kondisi geografis, keadaan penduduk serta aspek lain yang menyangkut kondisi dan wilayah penelitian. Sumber data dapat diperoleh melalui Kantor Kelurahan Bara-baraya Utara dan BPS Kota Makassar.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, meliputi:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek sasaran yang dibahas. Observasi ini dimaksudkan untuk melihat dari dekat masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara.
- b. Wawancara Mendalam kepada informan untuk keperluan data.
- c. Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT), yang terlibat dalam FGD yaitu informan yang telah diwawancarai. Pelaksanaan FGD dilakukan minimal sekali.
- d. Dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah pada penelitian ini.

## **F. Teknik Analisa Data**

Setelah data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan lingkup permasalahan yang dibahas, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan apa adanya serta menjelaskan secara komprehensif (menyeluruh) proses internalisasi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Bara-baraya Utara.

Data yang dikumpulkan di lapangan dipisahkan menurut pembahasan masing-masing permasalahan. Untuk memperkuat data tersebut dilakukan FGD di kelurahan. Data tersebut dianalisa berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya hasil analisis data tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan untuk memudahkan pembaca.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI**

Kelurahan Bara-baraya utara merupakan salah satu dari 14 kelurahan yang berada di Kecamatan Makassar, dengan luas wilayah 0,11 Km<sup>2</sup>, 1.364 jumlah rumah tangga dan 5.853 jumlah penduduk. Kelurahan Bara-baraya Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Maccini di sebelah utara, Kelurahan Bara-baraya di sebelah selatan, Kelurahan Maccini Bara-baraya Utara di sebelah barat dan Kelurahan Maradekaya di sebelah timur. Di Kelurahan Bara-baraya Utara jumlah RW yang ada yaitu 5 dan jumlah RT 19.

Potensi Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar secara umum terdiri dari tiga komponen yaitu:

#### **A. Potensi Penggunaan Lahan**

Di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, berdasarkan penggunaan lahan untuk :

##### **1. Perumahan/pemukiman**

Luas tanah perumahan/pemukiman penduduk yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu 10 ha.

## 2. Pekarangan

Luas tanah pekarangan penduduk yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu 0,60 ha.

## 3. Taman

Luas tanah taman yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu 0,10 ha.

## 4. Perkantoran

Luas tanah perkantoran yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu 0,10 ha.

## 5. Prasarana umum lainnya

Luas tanah prasarana umum lainnya yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu 0,20 ha.

## **B. Potensi Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data dari Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar selama Tahun 2010 maka potensi Sumber Daya Manusia terdiri dari:

### 1. Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar sebanyak 5.853 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.895 orang dan perempuan dengan jumlah 2.958 orang. Jumlah kepala keluarga 1.364 orang. (*Sumber: Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar, 2010*)

a. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Bara-baraya Utara**  
**Kecamatan Makassar Kota Makassar**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Belum Sekolah	516	8.83
2.	Usia 7 – 15 Tahun Tidak Pernah Sekolah	232	3.92
3.	Pernah Sekolah SD tetapi Tidak Tamat	475	8.12
4.	Tamat SD / Sederajat	1.185	20.25
5.	Tamat SMP / Sederajat	1.305	22.29
6.	Tamat SMA / Sederajat	1.400	23.93
7.	Diploma	147	2.53
8.	Strata Satu / Sarjana	565	9.65
9.	Strata Dua	28	0.47
<b>Jumlah</b>		<b>5.853</b>	<b>100</b>

*Sumber: Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar, 2010*

b. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok

Mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu :

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Pokok**  
**Di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar**  
**Kota Makassar**

No.	Mata Pencaharian Pokok	Jumlah	Persentase
1	PNS	79	14
2	TNI	6	1.06
3	POLRI	6	1.06
4	Dokter	2	0.35
5	Bidan	2	0.35
6	Pensiunan TNI/ POLRI	10	1.77
7	Pensiunan PNS	39	6.91
8	Pembantu Rumah Tangga	50	8.86
9	Supir	20	3.54
10	Pengrajin Industri Rumah Tangga	79	14
11	Pedagang Keliling	10	1.77
12	Montir	5	0.88
13	Pengusaha Kecil Menengah	60	10.63
14	Karyawan Perusahaan Swasta	61	10.81
15	Tukang Batu	74	13.12
16	Tukang Jahit	61	10.81
	<b>Jumlah</b>	<b>564</b>	<b>100</b>

*Sumber: Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar, 2010*

c. Keadaan penduduk berdasarkan agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu: Agama Islam sebanyak 4.939 orang, Agama Kristen sebanyak 862 orang, Agama Katolik sebanyak 40 orang, Agama Hindu sebanyak 4 orang dan yang beragama Budha sebanyak 8 orang.

d. Keadaan penduduk berdasarkan suku/etnis

Suku/ etnis yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu: Bugis sebanyak 1.090 orang,

Makassar sebanyak 2.353, Tionghoa sebanyak 50 orang dan suku lainnya sebanyak 1.575 orang.

### **C. Potensi Prasarana dan Sarana**

Prasarana dan Sarana yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu:

#### **a. Sarana Perumahan**

Sarana Perumahan yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, yaitu perumahan permanen sebanyak 89 unit, semi permanen sebanyak 275 unit dan darurat sebanyak 196 unit.

#### **b. Prasarana Air Bersih**

Prasarana air bersih yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, terdiri dari: Sumur gali sebanyak 125 buah, sumur pompa sebanyak 165 buah dan PAM sebanyak 585 buah.

#### **c. Prasarana Peribadatan**

Prasarana peribadatan yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu: Mesjid sebanyak 2 buah.

#### **d. Prasarana dan Sarana Pendidikan**

Prasarana dan sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, terdiri dari: TK

sebanyak 1 unit jumlah siswa 70 orang dengan jumlah guru 4 orang, SD/Sederajat sebanyak 1 unit jumlah siswa 65 orang dengan jumlah guru 8 orang dan SLTP/Sederajat sebanyak 1 unit jumlah siswa 80 orang dengan jumlah guru 18 orang.

e. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Prasarana dan sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, terdiri dari: Posyandu sebanyak 8 unit, Apotek sebanyak 2 unit, Dokter praktek sebanyak 5 orang, Bidan sebanyak 2 orang dan kader posyandu 46 orang.

**D. Keterkaitan antara Penanggulangan Kemiskinan, Potensi Kelurahan dan Modal Sosial**

Permasalahan kemiskinan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya saling berbeda, ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan sangat kompleks sehingga untuk merumuskannya perlu nalar yang bijak, tetapi beberapa hal yang bersifat homogen menjadi sesuatu yang jamak dan berlaku bagi seluruh daerah. Di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar pada tahun 2009 adalah sebanyak 3.805 jiwa atau 1.020 Kepala Keluarga yang tergolong miskin. Ini menjadi penting oleh karena persoalan kemiskinan selalu ditempatkan pada posisi yang selalu aktual dan faktual akibat dampak sosial yang

ditimbulkannya, serta jumlah yang miskin juga tidak mengalami penurunan yang drastis. Bahkan populasi warga miskin saat ini makin meningkat seiring dengan terjadinya krisis moneter dan resesi ekonomi lainnya, yang diperparah dengan munculnya beberapa kebijakan yang makin mengkondisikan masyarakat tetap menjadi miskin.

Selain kondisi kemiskinan tersebut di Kelurahan Bara-baraya Utara terdapat berbagai macam potensi kelurahan yang diharapkan mendukung penanggulangan kemiskinan, namun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut dalam upaya mendorong potensi-potensi masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama upaya penanggulangan kemiskinan, adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

### **1. Faktor Geografis**

Wilayah Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar umumnya adalah wilayah perkotaan sehingga keterjangkauan sarana infrastruktur seperti transportasi, listrik, air bersih, media komunikasi, pengelolaan sampah dan sebagainya tidak merata kesemua wilayah dalam Kelurahan Bara-baraya Utara . Dengan kondisi geografis demikian maka hingga kini masih terdapat wilayah-wilayah yang minim ketersediaan infrastrukturnya secara umum.

## **2. Faktor Demografi**

Pola persebaran penduduk Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar umumnya sangat padat mengingat Kelurahan Bara-baraya Utara berada dalam wilayah perkotaan dalam Kecamatan Makassar yang dikenal dengan wilayah perdagangan yang percampuran etnis dari berbagai suku begitu dinamis yang kebanyakan bermata pencaharian pedagang sehingga menyulitkan dalam menggali swadaya dan gotong royong masyarakat dalam upaya pembangunan.

## **3. Faktor Sumber Daya Manusia**

Karena Kelurahan Bara-baraya Utara adalah wilayah perkotaan maka Sumber Daya manusianya juga cukup banyak, namun apabila ditelusuri secara teliti maka mereka itu sebagian besar adalah pendatang dari luar kelurahan yang domisilinya karena tempat kerja berada dalam wilayah Kelurahan Bara-baraya Utara . Ada beberapa masyarakat asli yang mempunyai tingkat keterampilan cukup atau intelektual yang cakap namun mereka kebanyakan keluar wilayah atau kota, sehingga mereka yang tertinggal dalam wilayah hanyalah mereka yang mempunyai kualitas yang kurang sehingga berimplikasi pada pola pikir dalam mengembangkan mata pencaharian dan meningkatkan pendapatannya yang masih menerapkan sistem ekonomi

konvensional yang cenderung subsistem memenuhi kebutuhan domestik.

#### **4. Faktor Sumber Daya Alam**

Wilayah Kelurahan Bara-baraya Utara adalah perkotaan yang merupakan sentra bisnis bagi masyarakat, umumnya bangunan yang dominan adalah kawasan perumahan dan ruko sehingga lahan hijau hampir tidak ada. Umumnya masyarakat memaksimalkan lahan untuk lahan perumahan.

#### **5. Faktor Sosial Budaya**

Pola hubungan sosial masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara sangat dinamis karena banyaknya suku atau etnis pendatang dari luar Kota. Tuntutan untuk mempertahankan budaya lokal sedikit longgar yang dipengaruhi oleh para pendatang dari luar tadi, hal itu membuat masyarakat lokal terpengaruh akan pola pikir yang dibawa oleh kaum urban tersebut, selain etnis bugis Makassar, juga terdapat etnis lain seperti mandar dan toraja serta suku-suku lain yang mendiami Bara-baraya Utara juga terlibat dalam proses interaksi budaya dan pola pikir sehingga simbol-simbol lokal pada masyarakat kelurahan mengalami pergeseran, namun hal itu bukanlah suatu bentuk dari ekspansi budaya melainkan suatu bentuk kerukunan sosial dan

solidaritas budaya yang mempengaruhi pada naik turunnya etos kerja dalam membangun Kelurahan Bara-baraya Utara.

#### **6. Faktor Ketersediaan dan Akses Sarana & Prasarana Fisik**

Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dan melakukan aktivitas ekonominya.

#### **7. Faktor Iklim**

Kondisi wilayah Kota Makassar adalah 90 % merupakan daerah dataran yang sangat dekat dengan laut sehingga iklim juga merupakan faktor mempengaruhi terhadap pola hidup dan kondisi masyarakat setempat, Cuaca sangat tidak menentu, antara iklim hujan dan kemarau siklus sangat cepat ini dipengaruhi karena ruang-ruang hijau hampir tidak ada, khususnya wilayah perkotaan.

#### **8. Faktor Keterbatasan Keuangan Daerah**

Kondisi topografi wilayah Kelurahan Bara-baraya Utara dengan kontur daratan dan penyediaan keuangan daerah yang berimbang menuntut perencanaan yang lebih matang, mengingat bangunan yang begitu sesak sehingga untuk membangun sarana infrastruktur yang lebih berbobot dan tahan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Selain itu kesemrautan

dapat menimbulkan wilayah yang kumuh sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mewujudkan pemukiman yang bersih dan sehat.

#### **9. Faktor Kebijakan Pembangunan**

Pola pendekatan pembangunan dimasa lalu yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dengan konsep trickle down effect justru melahirkan persoalan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk dan Eksistensi Modal Sosial di Kelurahan Bara-baraya Utara

Sebelum membahas bentuk dan eksistensi modal sosial di Kelurahan Bara-baraya utara, Berikut organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan Bara-baraya Utara :

**Tabel 5.1**  
**Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Bara-baraya Utara**

No.	Nama Organisasi	Fokus Kegiatan
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Mandiri	Pemberdayaan Masyarakat
2.	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Surya Abadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
3.	Yayasan Mesjid Ilham	Keagamaan
4.	Majelis Taklim "Ilham"	Keagamaan
5.	Majelis Taklim "Haqul Yaqin"	Keagamaan
6.	Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) Batara	Mitra Polisi/ Keamanan
7.	Kerukunan Masyarakat Jawa	Pengajian/ Arisan
8.	Kerukunan Masyarakat Sinjai	Pengajian/ Arisan
9.	Kerukunan Masyarakat Selayar	Pengajian/ Arisan
10.	Kerukunan Masyarakat Enrekang	Pengajian/ Arisan
11.	Himpunan Majelis Taklim (HIMATA) "Sabilul Muttaqin"	Pengajian/ Arisan

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010*

Dari beberapa lembaga tersebut di atas yang fokus terhadap penanggulangan kemiskinan yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM) Surya Abadi dan Yayasan Mesjid Ilham. Berikut tentang kedua lembaga tersebut di atas:

### **1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Surya Abadi**

Keberadaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)/ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). P2KP di Kelurahan Bara-baraya Utara ada sejak tahun 2004 program ini memfasilitasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang berupa tersusunnya PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) dan terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Surya Abadi merupakan salah satu lembaga yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar. BKM ini merupakan wadah masyarakat yang bersinergi dengan lembaga lainnya dan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. BKM ini terbentuk sebagai amanah dari masyarakat untuk membangun masyarakat yang mandiri dan madani dengan berlandaskan kepada nilai-nilai universal.

BKM merupakan wadah bersinergi yang representatif, mengakar dan dipercaya oleh pihak luar. Sebagai wadah untuk bersinergi, BKM dipimpin oleh pimpinan kolektif yang dipilih berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan atau secara sederhananya dipilih berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang dimiliki orang

orang yang tinggal di kelurahan tersebut yang dinilai oleh masyarakat dari rekam jejaknya selama hidup beraktifitas di masyarakat.

Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asah, saling asih dan saling asuh antar anggota pimpinan kolektif dan pada akhirnya akan menjamin terjadinya proses demokrasi, tanggung gugat dan transparansi. Di samping itu pola kepemimpinan ini merupakan kolektif ini merupakan disinsentif bagi para pemimpin yang justru ingin mendapatkan kekuatan absolut dari satu tangan yang pada gilirannya akan melahirkan tirani dan ketidakadilan karena lebih mementingkan diri sendiri/kerabatnya.

Sebagai sebuah lembaga BKM menjadi milik masyarakat kelurahan, sehingga seluruh warga berhak untuk terlibat dalam program yang dimotori oleh BKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan/ pemanfaatan, pengawasan/ monitoring dan evaluasi. Atas dasar itulah harus muncul sebagai suatu kebutuhan masyarakat maupun anggota BKM dan UP-UP untuk dapat mereview kembali kelembagaan BKM secara berkala sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dapat terwujud.

BKM ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan pilihan masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan adanya lembaga yang dapat mengelola dana-dana pemberdayaan khususnya dari Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat P2KP. Olehnya itu dipilih pimpinan kolektif yang diberi nama BKM Surya Abadi dimana awal terbentuknya pada tanggal 21 April 2005 dengan jumlah anggota 13 orang, semua anggotanya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dan keputusan yang diambil harus kolektif melalui rapat anggota BKM dimana musyawarah, mufakat menjadi dasar utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

Pembangunan BKM melalui proses yang panjang dimana metode yang digunakan adalah metode rembug (musyawarah) dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan BKM. Adapun proses pembangunan BKM ini sebagai berikut :

1. Rembug pembentukan panitia
2. Coaching panitia pembangunan BKM
3. Rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM
4. Rapat penyusunan Anggaran Dasar BKM
5. Rembug warga tingkat RT/RW untuk sosialisasi pembangunan BKM
6. Pemilihan utusan warga tingkat RT/RW
7. Pertemuan refleksi
8. Rembug warga tingkat kelurahan untuk pengesahan Anggaran Dasar BKM dan proses pemilihan anggota BKM
9. Pengukuhan anggota BKM dan pengambilan sumpah.

Proses pembangunan BKM ini sudah berjalan selama 3 (tiga) kali dimana masa periode pimpinan kolektif adalah 2 tahun sehingga pada tanggal 6 Desember 2009 telah diadakan lagi proses pembangunan BKM baru untuk periode 2009-2011.

Adapun visi dan misi BKM Surya Abadi adalah sebagai berikut :

**1. Visi**

Unggul dalam partisipasi menuju masyarakat sejahtera

**2. Misi**

- a. Melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan
- b. Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat miskin
- c. Mengupayakan penanggulangan kemiskinan dan berbagai kebijakan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Meningkatkan pola pikir masyarakat dari ketergantungan menjadi masyarakat mandiri
- e. Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan, baik formal maupun non formal.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, BKM mengangkat koordinator BKM yang akan mengkoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat ini. Selain itu BKM membentuk unit-unit pengelola yaitu : Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan mengangkat seorang sekretaris yang membantu dalam pelaksanaan administrasi BKM.

BKM sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah kelurahan sasaran, mempunyai tugas-tugas pokok merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayahnya, memfasilitasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan demokratis. Tujuan besar dari seluruh upaya ini adalah penurunan angka kemiskinan di kelurahan.

Dalam menjalankan kebijakannya BKM dibantu oleh Unit pengelola (UP-UP), sehingga BKM lebih fokus di dalam membuat kebijakan dan memonitoring segala kegiatan. UP-UP bertanggung jawab penuh kepada BKM.

BKM adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah kelurahan dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan
  - a. Mengembangkan aturan mekanisme penentuan penerima manfaat langsung termasuk keseimbangan antara laki-laki dan perempuan
  - b. Merumuskan mekanisme pengajuan usulan kegiatan dari KSM
  - c. Merumuskan mekanisme kontrol sosial (monev partisipatif termasuk Pengelolaan Pengaduan Masyarakat)

- d. Merumuskan mekanisme perencanaan partisipatif (termasuk di dalamnya peningkatan partisipasi perempuan)
  - e. Merumuskan mekanisme pinjaman bergulir
  - f. Merumuskan mekanisme pertanggungjawaban KSM, UP-UP dan BKM
  - g. Merumuskan aturan keuangan internal BKM
  - h. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan)
  - i. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil
2. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP
    - a. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat
    - b. Membangun transparansi
    - c. Membangun akuntabilitas
    - d. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
    - e. Memastikan adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP-UP, termasuk penggunaan keuangan
  3. Mengawal terlembaganya nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan

- a. Bekerjasama dengan UP-UP dan relawan untuk mendorong kegiatan kolektif masyarakat
  - b. Mendorong kepedulian warga dalam bentuk penggalangan dana publik
  - c. Memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk menjadi relawan
4. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah
  5. Membangun kerjasama dengan pihak luar
    - a. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota.
    - b. Membangun dengan pihak lain, seperti bank, koperasi, perusahaan.

BKM bukanlah sebagai pelaksana program, akan tetapi berfungsi sebagai penggerak dan pengendali agar program penanggulangan kemiskinan berjalan.

Dalam membangun Modal sosial BKM harus melakukan :

- a. Membangun kerjasama dan kepercayaan diantara anggota BKM
- b. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM dan masyarakat
- c. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat

- d. Menumbuhkan kerjasama antara BKM dengan pihak luar (kemitraan).

**a. Keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di BKM Surya Abadi Kelurahan Bara-baraya Utara**

Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak Kelompok Masyarakat, baik yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM Mandiri Perkotaan juga menggunakan pendekatan kelompok, maka PNPM Mandiri Perkotaan akan banyak membentuk KSM, meskipun tidak menutup kemungkinan memaksimalkan kelompok-kelompok yang sudah ada, sebab ada kemungkinan kelompok PNPM Mandiri Perkotaan agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah ada, karena KSM di PNPM Mandiri Perkotaan adalah KSM yang terdiri dari warga miskin dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga miskin.

Terbentuknya KSM-KSM yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan akan muncul diantara kelompok-kelompok yang sudah eksis. Hal itu akan menambah dinamika dimasyarakat karena antar kelompok akan bisa saling berinteraksi dan saling belajar. Bahkan sangat memungkinkan kelompok yang telah lama eksis dan mempunyai banyak pengalaman bisa memberikan banyak masukan, bimbingan dan dorongan kepada kelompok baru. Sebaliknya, kelompok yang sudah eksis juga bisa belajar dari kelompok PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan demikian masing-

masing kelompok bisa menggalang persatuan dan kekuatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

#### **b. Prinsip-prinsip KSM**

Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota maka ada beberapa prinsip yang perlu disepakati, yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain : *Saling mempercayai dan saling mendukung*. Sikap tersebut bisa membuat anggota mampu mengekspresikan gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya.

*Bebas dalam membuat keputusan*. Kelompok bebas menentukan dan memutuskan menurut kesepakatan yang diambil oleh kelompok sendiri. Keputusan kelompok harus merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keputusan bersama

*Bebas dalam menetapkan kebutuhan*. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitasnya, KSM meningkatkan dan menguatkan tingkat kemampuan para anggotanya seperti: peningkatan kesejahteraan,

peningkatan wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan baik bersifat individu maupun kelompok

*Berpartisipasi nyata.* Setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok.

### **c. Peran dan fungsi KSM**

Dengan berkelompok, masyarakat bisa mengambil banyak manfaat darinya, karena KSM bisa memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis. Oleh karena itu, KSM bisa berperan dan berfungsi dalam banyak hal antara lain: *Pertama, sebagai sarana proses perubahan sosial.* Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru, serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. *Kedua, sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah.* Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM haruslah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya disepakati bersama. *Ketiga, sebagai wadah aspirasi.* Jika ada masalah, kepentingan, atau harapan yang berkembang di masyarakat; maka kelompok bisa berfungsi untuk menerima, membahas dan menyalurkan, kepada pihak-pihak yang relevan, dengan berpijak pada hak-hak warga. *Keempat, sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang social trust).* Dalam kelompok anggota bisa saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

dan membagi tanggung jawab. Saling kepercayaan sosial ini dibangun melalui cara penjaminan dan rekomendasi kelompok. Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lain, kepercayaan tersebut sebagai modalnya. *Kelima, Sebagai sumber ekonomi.* Jika masyarakat membutuhkan dana, maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar, maupun juga dari internal anggota sendiri. dengan cara iuran bersama. Iuran tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan/ pemersatu dan membangun kekuatan sendiri.

#### **e. KSM Mandiri**

Dalam perjalanannya, tidak sedikit KSM mengalami kegagalan dalam membangun kelompok, sehingga tidak mampu bertahan lama. Adapun faktor-faktor yang menjadikan KSM mandiri, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Keorganisasian :**

*Pertama,* KSM memiliki tujuan dan program kerja yang jelas, *kedua,* semua pengurus KSM mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, *ketiga,* KSM memiliki AD/ART (tertulis), *keempat,* semua anggota melaksanakan kewajiban dan haknya dengan baik, *kelima,* solidaritas antar anggota semakin kuat, *keenam,* KSM mampu mengambil keputusan secara mandiri dan demokratis.

## **2. Administrasi**

*Pertama*, KSM memiliki perangkat pembukuan (organisasi dan keuangan) yang lengkap, *kedua*, pengurus KSM memiliki kemampuan dan trampil mengelola pembukuan, *ketiga*, KSM memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dilaporkan secara rutin ke anggota, *keempat*, KSM memiliki sistem informasi manajemen.

## **3. Permodalan**

*Pertama*, tabungan KSM beragam dan terus meningkat, *kedua*, KSM mampu mengelola dana dari luar, *ketiga*, dana kelompok mampu memenuhi kebutuhan pinjaman anggotanya, *keempat*, pengembalian pinjaman anggota lancar (95%)

## **4. Usaha**

*Pertama*, usaha produktif anggota terus berkembang dan menguntungkan, *kedua*, sarana kerja dan pelayanan semakin lengkap, *ketiga*, KSM mampu membiayai operasional secara layak

## **5. Akseptasi**

*Pertama*, keanggotaan KSM terus meningkat baik jumlah maupun mutunya, *kedua*, pengetahuan dan keterampilan anggota semakin berkembang, *ketiga*, kehadiran KSM semakin dikenal dan diterima masyarakat, *keempat*, KSM ikut menentukan dalam pengambilan keputusan tingkat kelurahan.

## **2. Yayasan Mesjid Ilham**

Yayasan Mesjid Ilham merupakan yayasan yang berada di Mesjid Ilham Kelurahan Bara-baraya Utara yang berfokus terhadap kegiatan keagamaan. Dalam menjalankan kegiatannya dibentuklah sebuah kepengurusan yang terdiri dari pengurus yayasan, Pengurus dan seksi-seksi pelaksana. Dari seksi-seksi pelaksana ada satu seksi yang fokus terhadap kesejahteraan jamaah. Kegiatan yang dikelola oleh seksi kesejahteraan jamaah yaitu menghimpun dana dari jamaah mesjid berupa celengan dan donatur. Dari celengan masyarakat yang menyumbang seikhlasnya dan tidak ditentukan besarnya dan peruntukannya bersifat umum seperti pembangunan mesjid dan kesejahteraan jamaah. Sedangkan memakai sistem donatur, jamaah yang terdaftar sebagai donatur ditetapkan berdasarkan keputusan rapat besaran iurannya yaitu khusus KK Rp. 1.000/bulan dan anggota keluarga Rp. 500/bulan. Dari data yang ada di Mesjid Ilham untuk tahun 2011 ada 18 orang KK yang terdaftar sebagai donatur. Hasil yang dihimpun dari celengan dan donatur dikumpulkan dipengurus seksi kesejahteraan jamaah. Dari dana tersebut diperuntukkan jika ada salah seorang jamaah mesjid yang mengalami musibah berupa sakit atau meninggal dunia maka akan diberikan santunan dari hasil tersebut. Besarannya bervariasi dilihat dari kekuatan dana dan yang mengalami musibah pada waktu itu. Kegiatan ini telah berjalan kurang lebih 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang telah berjalan di masyarakat khususnya jamaah Mesjid Ilham.

Bentuk dan eksistensi modal sosial di Kelurahan Bara-baraya Utara dapat dilihat dari tiga unsur modal sosial yaitu: Kepercayaan (Trust), Jaringan/ Kerjasama (Networking) dan Norma-norma (Shared Norm). Berikut kondisi dari aspek tersebut:

### **1. Kepercayaan (Trust)**

Bentuk-bentuk kepercayaan (trust) yang ada dalam masyarakat di Kelurahan Bara-baraya Utara seperti yang ada pada:

#### **a. BKM Surya Abadi**

##### **1) Masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara memilih pengurus BKM dengan dasar kepercayaan**

Sistem pemilihan organisasi BKM Surya Abadi berbeda dengan pemilihan organisasi lain karena memakai sistem pemilihan langsung tidak ada calon dan tidak dicalonkan dengan syarat dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur, amanah, peduli atau seluruh prinsip-prinsip nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Masyarakat memilih langsung berdasarkan rekam jejak tanpa ada kampanye atau mobilisasi massa karena masyarakat saling menilai. Orang-orang yang dalam rekam jejaknya memiliki cacat di masyarakat dalam artian tidak berbanding dengan prinsip-prinsip tersebut maka secara otomatis tidak akan terpilih atau gugur dengan sendirinya. Karena jika salah pilih maka akan berdampak langsung terhadap pembangunan di wilayahnya. Pemilihan ini dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Wujud eksistensi BKM surya abadi menjaga kepercayaan yaitu setiap informasi BKM apakah administrasi

atau laporan keuangan dipasang atau ditempelkan di media-media informasi yang ada di kelurahan seperti mesjid, kantor lurah, selain itu setiap akhir tahun dilaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BKM kepada masyarakat melalui forum Rembug Warga Tahunan (RAT) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Selain itu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada pihak luar maka BKM Surya Abadi mengauditkan seluruh pembukuannya baik pembukuan BKM maupun pembukuan UPK ke Auditor Independen. Sejak berdirinya di tahun 2004 BKM Surya Abadi telah melaksanakan audit pada awal tahun setelah tutup buku dan hasilnya Wajar Tanpa Catatan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terpilih di BKM Surya Abadi dapat dipercaya.

**2) Peminjaman dana bergulir oleh UPK kepada KSM berlandaskan kepercayaan.**

Kondisi di Kelurahan Bara-baraya Utara bahwa ada lembaga yang bernama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Surya Abadi yang mana salah satu perangkatnya dalam hal ini Unit Pengelola Keuangan (UPK) mengelola dana bergulir dan yang meminjam adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BKM ini difasilitasi awalnya oleh P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang sekarang bernama PNPM Mandiri Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) P2KP di Kelurahan Bara-baraya Utara ada sejak tahun 2004 Sistem pengelolaan UPK BKM Surya Abadi, yaitu UPK memberikan bantuan dana bergulir kepada KSM dengan bermodalkan

kepercayaan dan tidak ada jaminan yang diberikan KSM kepada UPK. UPK memberikan bantuan kepada KSM karena berdasarkan rekam jejak daripada warga tersebut, jika salah seorang dari kelompok tersebut pernah bermasalah dengan lembaga keuangan, terlilit utang dan tidak mempunyai usaha maka UPK akan mempertimbangkan apakah layak diberikan pinjaman atau tidak karena ini menyangkut bantuan kepada warga miskin. Dan ketika masyarakat berhasil mengelolanya maka akan mendapatkan kesempatan sampai 4 kali meminjam. Selain itu kelompok yang meminjam akan tepat waktu membayar setiap minggunya atau setiap bulan karena ada dua sistem pembayaran yang dipakai yaitu mingguan dan bulanan tergantung dari jenis usaha dan kesanggupan membayar setiap kelompok. Masyarakat tepat waktu membayar ke UPK dan jika ada yang terlambat maka akan terlambat dicatatkan di pembukuan UPK jadi secara otomatis jika tidak dibukukan maka akan dianggap lewat jatuh tempo. Masyarakat tidak ingin dikatakan terlambat membayar, lebih baik menitipkan uangnya di UPK. Ini akan berdampak kepada penilaian UPK apakah berhak mendapat penambahan modal berikutnya. Bentuk kepercayaan ini berlangsung sejak tahun 2004 sejak adanya BKM. Namun dalam pengelolannya tidak semua kelompok yang taat membayar bahkan ada yang macet tetapi permasalahan ini mampu ditangani oleh petugas UPK. Jadi ada unsur kepercayaan sesama anggota KSM, KSM dengan UPK serta BKM.

## **b. Yayasan Mesjid Ilham**

### **1) Penggalangan dana oleh Seksi Kesejahteraan Jamaah dari Jamaah berlandaskan kepercayaan.**

Seksi Kesejahteraan Jamaah merupakan seksi yang berada dalam yayasan Mesjid Ilham. Tugas dari seksi ini adalah menghimpun dan mengumpulkan dana dari jamaah Mesjid Ilham dan menyalurkan bantuan ke masyarakat yang tertimpa musibah dalam bentuk santunan. Masyarakat atau jamaah Mesjid ilham menyalurkan bantuannya kepada pengurus seksi kesejahteraan jamaah dengan dasar kepercayaan. Dibuktikan dengan dana yang telah terkumpul disalurkan sesuai dengan yang berhak mendapatkannya. Pengelolaanya dilakukan dengan cara transparan karena dipasang di papan informasi mesjid. Seandainya hal tersebut tidak dilakukan maka secara otomatis jamaah mesjid tidak ada yang ingin menyumbang selain itu motifasi dengan amalan akhirat, artinya menyumbang dengan ikhlas.

## **2. Jaringan/ Kerjasama (Networking)**

### **a. BKM Surya Abadi**

#### **1) Kerjasama antara anggota BKM**

Model kerjasama ini mudah dijumpai di dalam masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara seperti dalam hal keperluan sehari-hari antara si A dengan si B saling memberi dan saling membantu apakah berupa kebutuhan pokok atau meminjam uang. Artinya saling membantu

berdasarkan tali persaudaraan karena bertetangga. Wujud kerjasama ini sifatnya aksidental. Model kerjasama ini sifatnya jangka panjang dan dimungkinkan diorganisir masuk dalam sebuah wadah atau organisasi karena berdasarkan tali pertemanan seperti halnya dalam BKM Surya Abadi seluruh anggota BKM dihimpun dalam sebuah wadah karena memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

#### **b. Kerjasama antara Anggota BKM dengan Masyarakat**

Kerjasama yang telah terbangun secara individu-individu dimungkinkan terorganisir dalam sebuah lembaga karena memiliki persamaan tujuan. Perwujudannya dapat dilihat di organisasi-organisasi yang ada dalam Kelurahan Bara-baraya Utara seperti LPM, BKM, KSM, dan Komunitas-komunitas masyarakat. Kerjasama yang terbangun sudah jelas pembagian kerjanya ada yang berperan sebagai ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Dalam prinsip organisasi tidak akan berhasil sebuah lembaga atau organisasi tanpa ada kerjasama di dalamnya

Bentuk kerjasama ini yang dapat mendorong penanggulangan kemiskinan karena terorganisir dalam sebuah wadah. Tergantung dari fokus kegiatan organisasi tersebut. Jadi aksesnya lebih luas lagi ada wadah BKM dan masyarakat.

#### **c. Kerjasama antara Masyarakat dengan Masyarakat**

Perwujudan kerjasama ini dapat dilihat pada lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara seperti kerjasama antara LPM

dengan BKM dalam hal pembangunan lingkungan, kerjasama BKM dengan pemerintah kelurahan dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti gotong royong. Bentuk kerjasama ini dapat dikatakan berupa kemitraan artinya menjalankan fungsinya masing-masing tanpa ada unsur intervensi di dalam atau campur tangan lembaga lain. Contoh lain yaitu masyarakat yang terhimpun dalam wadah yang bernama KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

#### **d. Kerjasama antara BKM dengan Lembaga di Luar Kelurahan (Kemitraan)**

Semua kerjasama berlandaskan kepercayaan akan berajalan jangka panjang akan tetapi membutuhkan waktu untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap pihak luar. Cara membangun kepercayaan dengan pihak luar dengan cara membangun kerjasama di dalam kelurahan. Jadi lembaga tersebut dipercaya masyarakat di dalam kelurahan dan diakui oleh pihak luar. Tidak mudah membangun kerjasama ini dibutuhkan berbagai macam usaha dan upaya dari berbagai pihak untuk menyusun kekuatan tentunya kekuatan kedalam artinya menyatukan seluruh potensi yang ada dalam kelurahan.

Masyarakat kelurahan Bara-baraya Utara telah menjalin kemitraan dengan salah satu lembaga Internasional yaitu International Labour Organisation (ILO) yang fokus terhadap pendidikan. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

*Sebenarnya tidak dapat diukur apa yang telah dilakukan warga untuk menanggulangi kemiskinan. Contohnya sudah ada 3*

*kegiatan penanggulangan kemiskinan seperti ada dari ILO tentang pelatihan HP, permintaannya 25 orang tetapi yang menjadi masalah adalah respon dari warga di mana mereka perlu bekerja dan tidak bisa mengikuti program tersebut. Inilah yang susah nya mengubah pola pikir. Sekarang banyak orang yang mengaku miskin.(wawancara dengan NAS, Oktober 2010)*

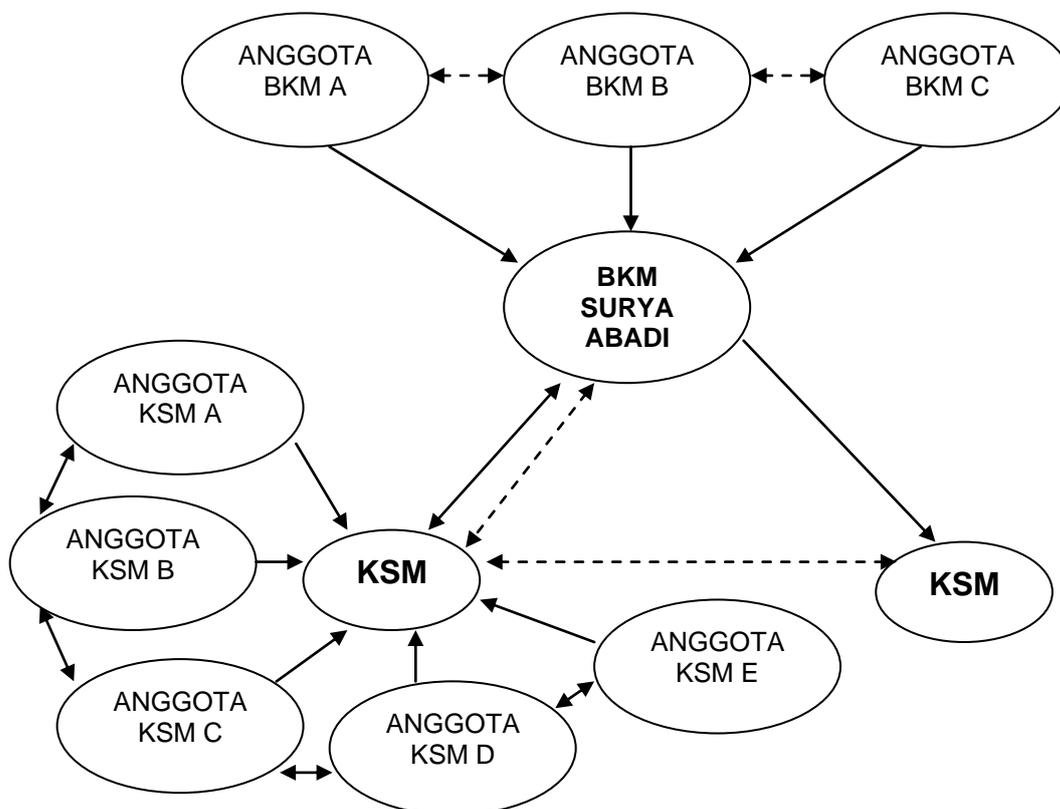
Pelatihan tersebut mengalami kendala karena kurang mendapat respon dari masyarakat disebabkan sibuknya bekerja dan mencari waktu luang. Pelatihan peningkatan SDM lainnya pernah juga dilakukan berupa kegiatan Pelatihan Kecantikan khusus perempuan, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Komputer dan Pelatihan Tabulampot yang diikuti oleh warga miskin dan produktif. Pelatihan ini dilaksanakan dengan bantuan PNPM Mandiri Perkotaan dan Swadaya Masyarakat. Pelatihan ini dengan peserta 10 Orang (Sumber Data: BKM tahun 2009).

Selain itu di Kelurahan Bara-baraya Utara dipercaya untuk mengelola beberapa program penanggulangan kemiskinan seperti :

- 1) PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
- 2) Program Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PNPM Pamsimas)
- 3) NICE
- 4) Pelatihan Kerjasama International Labour Organisation (ILO)
- 5) Green and Clean

Berikut pola jaringan modal sosial yang ada di BKM Surya Abadi:

**Gambar 5.1**  
**Jaringan Modal Sosial di BKM Surya Abadi**



Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari 9 anggota BKM Surya Abadi terhimpun dalam wadah organisasi BKM saling kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula halnya dengan KSM-KSM diantara mereka saling kerjasama dan percaya. Antara BKM dengan KSM saling percaya dan kerjasama. Dan antara KSM dengan KSM.

Bahwa hubungan antara BKM dengan KSM merupakan mitra kerja artinya BKM memfasilitasi KSM bukan merupakan atasan dan bawahan. BKM dan KSM menjalankan fungsinya masing-masing.

### **b. Yayasan Mesjid Ilham**

Selain itu dalam hal yang menyangkut kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat seperti halnya pada masyarakat dulu yang tetap mempertahankan budaya kerjasama. Sekarang ini sudah mulai luntur seiring berjalannya waktu. Seperti kebiasaan masyarakat Bugis Makassar dalam pesta perkawinan maupun kedukaan yang terjun langsung dalam hajatan tersebut sudah jarang kita jumpai seperti yang ada di desa-desa. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

*Kerjasama yang masih terjalin sekarang ini masih berlangsung di Barut adalah pada saat orang kawin kita biasa bersama-sama memasang tenda. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

*Sebenarnya tradisi ini sudah mulai berkurang karena adanya modernisasi karena masyarakat yang ada majemuk. Dulu setiap ada anggota masyarakat yang memerlukan bantuan kita melakukan patungan. Contohnya Pak Abbas, pada saat dia meninggal ada inisiatif dari perorangan untuk patungan membantu pengurusan pemakaman orang tersebut. Sekarang, nilai tersebut mulai luntur. Inilah yang sekarang kita coba gali kembali nilai kerjasama tersebut. (Wawancara dengan ABDR September 2010)*

Untuk mengantisipasi kegiatan tersebut di atas pada masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara mencoba menggalang dana di setiap RW yang dijadikan dana sosial sehingga bisa digunakan tiba-tiba jika ada yang membutuhkan. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

*Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu di setiap RW disiapkan dana sosial melalui iuran bulanan. Sehingga pada saat ada acara bisa digunakan, karena ditempat lain masih berjalan. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

Secara kelembagaan formal hal ini telah diinisiasi oleh lembaga keagamaan dalam hal ini Yayasan Mesjid Ilham. Diwujudkan dalam bentuk santunan dari jamaah mesjid yang dihimpun oleh pengurus mesjid. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

*Dari daerah sini seperti pengurus masjid ada santunan dari jamaah. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

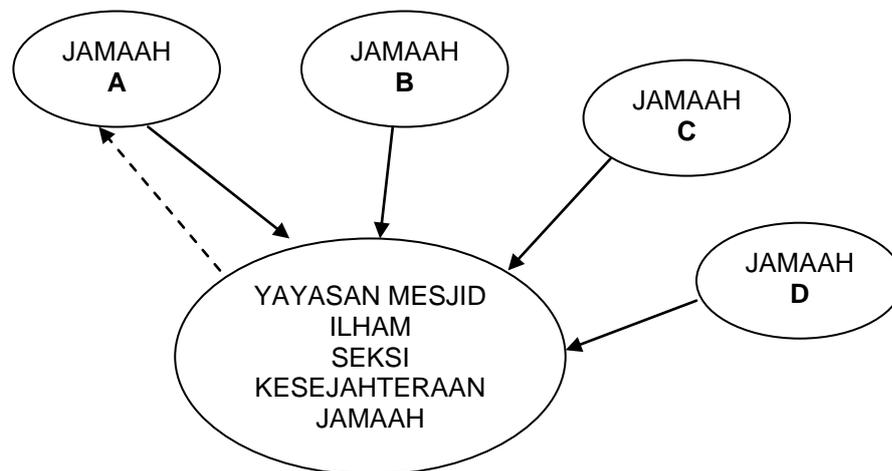
Jadi pada masyarakat kelurahan Bara-baraya Utara khususnya Yayasan Mesjid Ilham ada upaya untuk menjalin dan menggalangan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk santunan kesehatan dan kedukaan.

Pada kondisi masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara hal tersebut perlu di kembangkan lagi ke lembaga-lembaga lain yang ada di kelurahan seperti BKM, LPM sehingga kegiatan yang ada di Yayasan Mesjid Ilham berupa santunan bisa lebih berkembang. Jadi kegiatan yang sifatnya spontanitas atau akseidental dapat tersusun dengan baik, artinya kegiatannya sudah terhimpun dalam sebuah wadah. Seperti penuturan informan sebagai berikut:

*Melihat dari kondisi di sini, ada organisasi-organisasi yang bersifat formal seperti LPM, BKM karena memiliki landasan hukum. Ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat spontanitas. (Wawancara dengan MET September 2010)*

Berikut gambaran pola jaringan modal sosial yang ada di Yayasan Mesjid Ilham Seksi Kesejahteraan Jamaah:

**Gambar 5.2**  
**Jaringan Modal Sosial di Yayasan Masjid Ilham**  
**Seksi Kesejahteraan Jamaah**



KETERANGAN :

- > GARIS DONASI DAN CELENGAN
- > GARIS BANTUAN BERUPA MUSIBAH SAKIT DAN MENINGGAL DUNIA

### 3. Norma-norma (Shared Norm)

Masyarakat adalah suatu keseluruhan hubungan antar kelompok sosial dan individu dalam status dan peran yang berbeda di mana mereka hidup dalam wilayah tertentu (Rudito, Bambang.,Melia Famiola dalam Barfield, 2008:62). Di dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok dan golongan yang saling berhubungan. Masyarakat dapat dipahami sebagai suatu struktur sosial karena ia merupakan hubungan antar status dan peran. Dalam struktur sosial tersebut terdapat sistem nilai dan norma, norma-norma yang berdasarkan kebudayaan yang ada yang menjadi

acuan bagi orang-orang yang ada dalam masyarakat tersebut untuk bertindak dalam pranata-pranata yang ada.

Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks ini orang yang melanggar norma resiprokal yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak diberi sanksi negatif yang bersifat keras. Jaringan yang terbina lama dan menjamin kelangsungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan. Yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras pula (Blau dalam Lawang, 2004: 58).

Untuk mewujudkan keteraturan di masyarakat Kelurahan Barabraya Utara di dalam kelompok-kelompok masyarakat telah diatur beberapa aturan antara lain:

**a. Sanksi Moral**

Sanksi ini mungkin tidak sebanding dengan sanksi hukum akan tetapi bisa menimbulkan efek jera jika ada masyarakat yang berbuat. Sanksi ini dapat dilihat ketika ada masyarakat yang tidak terlibat seperti kegiatan kerja bakti. Ataukah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diamanahkan oleh warga seperti menggelapkan uang bantuan pemerintah selain bisa mendapatkan sanksi hukum juga mendapatkan sanksi moral berupa dikucilkan dari masyarakat.

Diharapkan dengan adanya sanksi ini terjadi kontrol sosial dimasyarakat sehingga dapat masyarakat dalam keadaan tertib. Maka perlu diatur mekanismenya seperti.

- 1) Rapat Internal BKM dalam rangka evaluasi dan monitoring.
- 2) Rapat Laporan Pertanggung Jawaban KSM kepada BKM
- 3) Rapat Laporan Pertanggung Jawaban BKM kepada Masyarakat
- 4) Penyampaian laporan keuangan setiap bulan kepada masyarakat berupa pemasangan di tempat-tempat umum.
- 5) Melaksanakan audit secara internal dan audit independen ke akuntan publik.

#### **b. Tanggung Renteng**

Seperti penjelasan di atas, untuk mengawal kepercayaan dan kerjasama maka perlu ada sanksi yang mengaturnya seperti tanggung renteng ini diterapkan di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sistem tanggung renteng yang ada dalam KSM didasarkan karena mempunyai permasalahan dan kebutuhan yang sama yaitu ingin keluar dari persoalannya dan ingin mengembangkan usahanya. Supaya kepercayaan dan kerjasama tersebut tetap terpelihara maka harus ada tanggung renteng atau tanggung bersama. Seperti jika dalam satu kelompok (KSM) ada salah seorang yang berhalangan membayar atau mempunyai keperluan yang lebih mendesak maka anggota yang lain dalam satu kelompok (KSM) berkewajiban membayarnya. Ada aturan-aturan main

yang diatur dalam internal kelompok (KSM) seperti adanya tabungan bersama.

Selain itu, Setiap anggota menjaminkan ke kelompoknya dalam hal ini KSM berupa barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis seperti TV, kulkas, radio, emas dan sebagainya. Barang atau benda tersebut tetap berada di rumah yang bersangkutan jika sewaktu-waktu tidak sanggup membayar pinjamannya maka barang tersebut oleh kelompoknya (KSM) dijual dan dihitung besaran pinjaman yang belum terbayarkan dan sisanya dikembalikan ke yang bersangkutan.

Modal sosial dalam hal ini kerjasama, kepercayaan bagaimana sebenarnya antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya bisa saling merangkul tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras, karena dengan kerjasama pekerjaan yang terasa berat bila dikerjakan secara bersama-sama dapat terasa ringan seperti sapu lidi yang tidak bisa dipisahkan bila ingin digunakan. Seperti penuturan informan :

*Modal sosial bagaimana kita merangkul satu sama lain tanpa melihat SARA, artinya kadang-kadang suatu pekerjaan itu terasa berat bila tidak dikerjakan bersama, contohnya: sapu lidi yang tidak bisa dipisahkan bila ingin digunakan. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

Senada dengan penuturan informan :

*Tanpa suatu kerjasama antara satu kelompok dengan yang lain maka apa yang direncanakan tidak dapat berhasil (Wawancara dengan IBRA September 2010)*

Pada dasarnya modal sosial itu penting dibangun di tengah masyarakat, dari penuturan informan tidak ada satu pun yang menjawab

bahwa modal sosial itu tidak penting adanya untuk dibangun. Karena dengan modal sosial dalam hal ini kerjasama, membangun kepercayaan segala sesuatu dapat diselesaikan dengan bersama-sama. Bahkan ada yang beranggapan bahwa modal sosial dapat mengalahkan modal-modal lainnya seperti modal finansial. Penuturan informan sebagai berikut:

*Modal sosial sangat kuat dan bisa mengalahkan modal finansial. Tanpa modal sosial kerjasama tidak dapat terbangun. ((Wawancara dengan MET September 2010)*

Informan ABDR justru mengaitkan dengan aspek keagamaan dan manajemen seperti penuturan sebagai berikut:

*Setiap manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial karena manusia diciptakan untuk beribadah, berbuat baik dengan sesama dalam artian kerjasama seperti konsep manajemen dimana kita bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai insan manusia kita memang disuruh untuk bekerjasama sehingga bila kerjasama dipupuk ke depannya akan melahirkan nilai. Inilah yang tidak dapat diukur secara finansial. Untuk terwujudnya sebuah kerjasama maka yang terlebih dahulu harus terbangun yaitu masyarakat sudah harus saling percaya karena dengan kepercayaan maka bisa terjalin kerjasama. (Wawancara dengan ABDR September 2010)*

*Untuk menumbuhkan kepercayaan juga dibutuhkan transparansi atau keterbukaan diantara semua pihak terutama yang tergabung dalam sebuah lembaga atau organisasi. (Wawancara dengan ABDR September 2010)*

Lebih lanjut tentang proses tumbuh dan berkembangnya modal sosial di masyarakat informan ABDR menjelaskan untuk terwujudnya sebuah kerjasama maka yang terlebih dahulu harus terbangun yaitu masyarakat sudah harus saling percaya karena dengan kepercayaan maka bisa terjalin kerjasama. Untuk menumbuhkan kepercayaan juga dibutuhkan transparansi atau keterbukaan diantara semua pihak terutama

yang tergabung dalam sebuah lembaga atau organisasi. Selain itu informan ABDR menambahkan bahwa modal sosial yang terorganisirlah yang dapat dipakai untuk penanggulangan kemiskinan.

#### **4. Solidaritas Sosial di BKM Surya Abadi dan Yayasan Mesjid Ilham**

##### **a. BKM Surya Abadi**

Solidaritas sosial yang terbangun pada BKM Surya Abadi yaitu: adanya ikatan yang terbangun dalam sebuah wadah yang bernama BKM. Solidaritas yang terbangun bukan berdasarkan etnis, suku, agama. Akan tetapi karena memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk penanggulangan kemiskinan. Maka untuk memudahkan pengorganisasiannya setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Seperti Koordinator BKM, Anggota BKM, Sekretaris, Unit Pengelola, Pengawas UPK, dan KSM. Tugas dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar yang tertulis di Akta Pendirian BKM Surya Abadi.

##### **b. Yayasan Mesjid Ilham**

Karena yayasan merupakan kegiatan yang sifatnya keagamaan, maka solidaritas yang terbangun berlandaskan keagamaan. Artinya orang-orang yang terhimpun dalam sebuah wadah yang bernama Mesjid Ilham memiliki kesamaan yaitu untuk mendapatkan amalan. Untuk memudahkan roda organisasi maka dibentuk seksi-seksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Termasuk seksi

kesejahteraan jamaah yang menghimpun kegiatan dalam bentuk santunan ke jamaah mesjid. Tentunya peruntukannya sebatas umat muslim saja. Seperti penuturan ABDR sebagai berikut.

*Ada anggapan di masyarakat lebih baik kita yang menyumbang ke mesjid daripada kita yang disumbang. Itu berarti kita dalam kondisi sakit. Kegiatan ini peruntukannya untuk jamaah Mesjid Ilham. (Wawancara dengan ABDR, Mei 2011)*

## **B. Kontribusi Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan**

### **1. Kondisi Kemiskinan di Kelurahan Bara-baraya Utara**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Meskipun dalam sejarah penanggulangan kemiskinan sejak Orde Baru telah tercatat penurunan cukup signifikan, tetapi pasca krisis ekonomi akhir 1997 hingga saat ini, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah dominan yang dialami rakyat Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan di Makassar, apapun yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan situasi nasional dan tantangan berat yang dewasa ini dihadapi bangsa Indonesia, di tengah-tengah masa transisi menuju demokratisasi tata penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berkeadilan.

Adapun pendekatan kategori miskin di Kelurahan Bara-baraya Utara berdasarkan :

- a) Kriteria miskin menurut hasil Pemetaan Swadaya (*Kegiatan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan*)

- b) Kriteria miskin menurut BKKBN
- c) Kriteria miskin menurut BPS
- d) Keadaan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Bara baraya Utara

Penyebab kemiskinan di Kelurahan Bara-baraya Utara antara lain adalah :

- a) Rendahnya tingkat pendidikan
- b) Rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh warga
- c) Rendahnya pendapatan yang di terima oleh kepala keluarga
- d) Banyaknya pengangguran
- e) Kurangnya pengetahuan warga tentang wirausaha atau industri rumah tangga yang dapat dikembangkan.
- f) Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam membantu menambah penghasilan keluarga.
- g) Semakin tingginya harga BBM yang mengakibatkan harga bahan pokok naik.

Jumlah warga miskin yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara pada tahun 2009 adalah sebanyak 3.805 jiwa atau 1.020 Kepala Keluarga miskin atau sekitar 65 %. Identifikasi dan Penyebab Masalah di Kelurahan Bara-baraya Utara sebagai berikut :

- a) Permasalahan di bidang kesehatan

Masih terdapatnya balita kurang gizi disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang gizi kesehatan, kondisi ekonomi masyarakat

sehingga memberi makan anak apa adanya, tidak maksimalnya pelayanan posyandu. Tingkat kesehatan ibu hamil rendah disebabkan oleh tingginya biaya pengobatan, rendahnya pengetahuan warga tentang gizi bagi ibu hamil. Terdapat warga yang menderita TBC disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit TBC.

b) Permasalahan di bidang pendidikan

Terdapat anak yang putus sekolah disebabkan oleh mahalnya biaya sekolah. Banyak anak yang terancam putus sekolah disebabkan oleh belum adanya paket pendidikan gratis. Masih ada warga yang buta huruf disebabkan oleh belum adanya program kejar paket A/BC.

c) Permasalahan di bidang ekonomi

Pendapatan warga yang rendah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan warga tentang kewirausahaan, kurang atau tidak mempunyai modal, kemampuan untuk memasarkan produk terbatas. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat keterampilan.

d) Permasalahan di bidang lingkungan

Terdapat rumah tidak layak huni disebabkan oleh tidak mempunyai dana untuk perbaikan rumah. Pembuangan air kotor tidak lancar disebabkan oleh saluran air got banyak yang tersumbat dan rusak. Sering terjadi penumpukan sampah disebabkan oleh kurangnya sarana pengangkutan sampah, tidak adanya pengetahuan tentang pemanfaatan sampah organik. Kurangnya tanaman hijau disebabkan oleh rendahnya

kesadaran warga akan pentingnya lingkungan yang bersih dan hijau. Terdapat jalan yang gelap pada malam hari disebabkan oleh tidak ada dana untuk pengadaan tiang dan lampu jalan.

## **2. Realitas Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Bara-baraya Utara**

### **a) Perluasan Akses Kesehatan**

Untuk mendorong masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di Kelurahan Bara-baraya Utara telah ada sebuah wadah yang terorganisir dengan baik di yayasan Mesjid Ilham seksi kesejahteraan jamaah. Seksi kesejahteraan jamaah yaitu menghimpun dana dari jamaah mesjid berupa celengan dan donatur. Jadi ada dua jenis model sumbangan masyarakat yaitu memakai sistem celengan dan sistem donatur. Sistem celengan dia ambil dari Shalat Jum'at dan Shalat Magrib. Dan sistem donatur diambil dari jamaah yang terdaftar dalam daftar donatur dan dihimpun setiap bulannya.

Dari sistem tersebut ada masyarakat yang ingin memilih sistem celengan dan peruntukannya bersifat umum untuk pembangunan mesjid dan sistem donatur khusus menangani kesejahteraan jamaah saja. Besaran celengan tidak menentu karena tergantung dari yang memberikan sumbangan. Sedangkan sistem donatur ditetapkan dalam keputusan rapat besaran iurannya yaitu khusus Kepala Keluarga Rp. 1.000/bulan dan anggota keluarga Rp. 500/bulan. Dari data yang ada di Mesjid Ilham untuk tahun 2011 ada 18 orang KK yang terdaftar sebagai

Donatur. Hasil yang dihimpun dari Celengan dan Donatur dikumpulkan di pengurus seksi Kesejahteraan Jamaah.

**Tabel 5.2**  
**Daftar Donatur Yayasan Masjid Ilham**  
**Seksi Kesejahteraan Jamaah Tahun 2011**

No.	Nama	Tanggungjan	Setoran perbulan	Miskin/ Non Miskin
1	Drs. KH. Jalaluddin Sanusi	7 Orang	4,000	Non Miskin
2	H. Muh. Arif	5 Orang	3,000	Non Miskin
3	Muh. Kiming, SE	2 Orang	1,500	Non Miskin
4	H. Hading Dg. Tutu	4 Orang	2,500	Non Miskin
5	Ibu Hanifah	2 Orang	2,500	Non Miskin
6	Dg. Ngawing	2 Orang	1,500	Miskin
7	B. Dg. Bundu	3 Orang	1,500	Non Miskin
8	Nur Halim Cala, BA	6 Orang	3,500	Non Miskin
9	H. Amir Sibali	7 Orang	4,000	Miskin
10	Nasrun, SE	3 Orang	2,000	Non Miskin
11	Sunggu Alam	3 Orang	2,000	Miskin
12	Dg. Sipato	2 Orang	1,500	Miskin
13	Ny. Hj. Hajirah	4 Orang	2,500	Non Miskin
14	Drs. Mursalim R	4 Orang	2,500	Non Miskin
15	Ny. Darima Simanu	2 Orang	1,500	Miskin
16	Amir Sikki	3 Orang	2,500	Miskin
17	Arsyad Sajo	4 Orang	2,500	Miskin
18	M. Hatta	4 Orang	2,500	Miskin

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011*

Dari dana yang terhimpun tersebut diperuntukkan untuk kegiatan kesehatan dan kedukaan artinya jika ada salah seorang jamaah mesjid yang mengalami musibah berupa sakit atau meninggal dunia maka akan diberikan santunan dari hasil tersebut. Besarannya berbeda dilihat dari kekuatan dana dan yang mengalami musibah pada waktu itu. Kegiatan ini

telah berjalan kurang lebih 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang telah berjalan di masyarakat khususnya jamaah mesjid Ilham.

Menurut informan ABDR yang kebetulan pernah menangani seksi Kesejahteraan Jamaah sekarang bendahara II Yayasan Mesjid Ilham menuturkan:

*Jika ada seorang jamaah yang sudah 3 (tiga) hari tidak ikut berjamaah di mesjid maka jamaah mesjid akan mempertanyakan ke yang lainnya. Karena si A tidak datang berjamaah sehat-sehatji. Sehingga dilakukanlah kunjungan jika mengalami musibah itu dan diberikan santunan. (Wawancara dengan ABDR, Mei 2011)*

Ini berarti pada masyarakat kelurahan Bara-baraya utara ada upaya menghimpun dana untuk membantu masyarakat khususnya dari aspek kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin akan tetapi seluruh Jamaah Mesjid Ilham. Menurut penuturan ABDR mengatakan bahwa:

*Ketika ada jamaah yang sakit tetapi dari sisi keuangannya mampu maka sumbangan dari para jamaah itu dimasukkan kembali ke Mesjid untuk menjadi sumbangan. Ada juga masyarakat yang berpandangan lebih baik kita yang memberikan santunan daripada kita yang disantuni. (Wawancara dengan ABDR, Mei 2011)*

Sedangkan kegiatan-kegiatan kesehatan lainnya yaitu berupa sunatan massal yang dilaksanakan atas kerjasama antara masyarakat dengan pihak pemerintah dalam hal ini puskesmas.

#### b) Perluasan Akses Pendidikan

Dalam upaya memperluas akses terhadap pendidikan di Kelurahan Bara-baraya Utara telah dilakukan upaya dalam bentuk pendidikan informal berupa pelatihan-pelatihan peningkatan SDM walaupun belum

dapat diukur pada tingkat keberhasilannya tapi masyarakat kelurahan Bara-baraya Utara telah menjalin kemitraan dengan salah satu lembaga Internasional yaitu International Labour Organisation (ILO) yang fokus terhadap pendidikan. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

*Sebenarnya tidak dapat diukur apa yang telah dilakukan warga untuk menanggulangi kemiskinan. Contohnya sudah ada 3 kegiatan penanggulangan kemiskinan seperti ada dari ILO tentang pelatihan HP, permintaannya 25 orang tetapi yang menjadi masalah adalah respon dari warga di mana mereka perlu bekerja dan tidak bisa mengikuti program tersebut. Inilah yang susahya mengubah pola pikir. Sekarang banyak orang yang mengaku miskin.(wawancara dengan NAS, Oktober 2010)*

Pelatihan tersebut mengalami kendala karena kurang mendapat respon dari masyarakat disebabkan sibuknya bekerja dan mencari waktu luang. Pelatihan peningkatan SDM lainnya pernah juga dilakukan berupa kegiatan Pelatihan Kecantikan khusus perempuan, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Komputer dan Pelatihan Tabulampot yang diikuti oleh warga miskin dan produktif. Pelatihan ini dilaksanakan dengan bantuan PNPM Mandiri Perkotaan dan Swadaya Masyarakat. Pelatihan ini dengan peserta 10 Orang (Sumber Data: BKM tahun 2009).

Pelatihan-pelatihan tersebut ditujukan untuk peningkatan SDM masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara agar bisa mandiri dan produktif dan keluar dari persolan kemiskinan.

#### c) Perluasan Akses Ekonomi

Membahas mengenai perluasan akses masyarakat miskin terhadap lembaga perekonomian seperti pada pembahasan di atas bahwa terdapat

lembaga perekonomian yang ada di masyarakat yaitu : Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM.

Dalam mengembangkan usaha masyarakat membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, berbagai macam lembaga perekonomian telah diaksesnya untuk mengembangkan usaha. Seperti koperasi, perbankan, pegadaian bahkan rentenir yang berkedok koperasi. Tidak jarang masyarakat terlilit utang piutang sampai ke penyitaan harta milik dengan cara paksa. Sungguh tidak rasional masyarakat miskin yang ingin ditingkatkan derajat hidupnya malah jatuh miskin kembali. Ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu lembaga yang ada di masyarakat yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Surya Abadi yang memberikan bantuan langsung terhadap masyarakat turut berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Surya Abadi membina langsung Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dimana setiap KSM minimal 5 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dengan pendekatan sistem tanggung renteng (tanggung jawab bersama). Berikut beberapa KSM yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara yang dianggap berhasil dalam mengelola kegiatan ekonomi bergulir yang diberikan oleh UPK.

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana ekonomi bergulir berdasarkan sumber data dari BKM Surya Abadi yaitu:

- 1) Warga miskin yang terdata di PS 2 (Pemetaan Swadaya 2)

- 2) Berdomisili di kelurahan yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili dari kelurahan.
- 3) Tergabung dalam satu KSM yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
- 4) Tabungan 10 % dari total pinjaman
- 5) Ada kesepakatan tanggung renteng dari anggota KSM

Persyaratan tersebut yang akan diverifikasi oleh UPK yang selanjutnya dilakukan survey lapangan untuk sinkronisasi data yang telah diajukan oleh KSM. Dari hasil tersebut apakah layak diberikan pinjaman atau tidak dan diputuskan ditingkat pimpinan kolektif BKM. Setiap orangnya untuk pemberian bantuan modal pertama maksimal Rp. 500,000 dan selanjutnya maksimal Rp. 2,000,000. atau 4 kali pinjaman.

Berdasarkan data di BKM Surya Abadi Kelurahan Bara-baraya Utara untuk kegiatan Ekonomi bergulir dapat dilihat perkembangan keuangannya sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Tingkat Perkembangan Keuangan UPK BKM Surya Abadi**

No.	Uraian Keuangan	Tingkat Perkembangan Keuangan		
		Jan 2009	Jan 2010	Jan 2011
1.	Modal Awal PNPM	100,000,000	100,000,000	100,000,000
2.	Laba	19,190,867	34,782,165	27,238,791
3.	Jumlah KSM	57 KSM	56 KSM	54 KSM
4.	Jumlah Anggota KSM	290 Orang	283 Orang	283 Orang
5.	Alokasi Pembagian Laba			
	Kegiatan Lingkungan		5,217,325	Belum di Alokasikan
	Kegiatan Sosial		5,217,325	Belum di Alokasikan
	Pemupukan Modal		6,950,432	Belum di Alokasikan
	BOP (Biaya Operasional) BKM		17,391,083	Belum di Alokasikan

*Sumber : Data UPK BKM Tahun 2011*

Dari tahun ke tahun UPK BKM Surya Abadi mengalami perkembangan keuangan yang cukup berhasil dibuktikan dengan berhasil mengelolah kegiatan ekonomi bergulir. Dari hasil laba yang didapatkan dapat membiayai kegiatan lingkungan dan sosial artinya kegiatan ekonomi dapat membiayai kegiatan lainnya.

Berikut data KSM yang meminjam di UPK Surya Abadi dan realisasi pinjaman periode 2008-2010.





Dari data tersebut di atas bahwa dari 69 KSM dengan jumlah 346 anggota KSM menunjukkan bahwa ada 27 KSM yang meminjam 1 kali, 11 KSM yang meminjam 2 kali dan 31 KSM yang meminjam 3 kali. Ini menunjukkan terjadi peningkatan usaha pada KSM tersebut. Dengan meminjam di UPK sebanyak 2 dan 3 kali berarti perputaran usaha pada setiap KSM terjadi peningkatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Besaran pinjaman setiap kalinya tergantung dari hasil perputaran usaha setiap KSM.

Berikut contoh KSM yang berhasil mengembangkan usahanya dengan meminjam di UPK BKM Surya Abadi kelurahan Bara-baraya Utara.

Kasus pada KSM Sejahtera (Kegiatan Ekonomi Bergulir) **"Dari kedondong ke Kelontongan"**

*KSM Sejahtera beranggotakan 7 orang, adapun proses pembentukannya berawal dari tujuan yang sama. Di tahun 2007 KSM Sejahtera mendapat Pinjaman Bergulir dari UPK BKM Surya Abadi sebesar Rp.3.500.000,- dimana perorang mendapat bantuan Rp 500.000,- ketua KSM Sejahtera dalam hal ini Pak Ismed juga mendapatkan Pinjaman yang sama. Adapun Usaha dari Pak ismed yaitu jualan kelontongan dengan hanya menjual dagangannya di meja saja. Dari dana Pinjaman yang diberikan kemudian dibelikan beberapa barang untuk usaha menambah barang dagangannya yang sudah ada, kemudian usaha berjalan dan pada tahun 2008 setelah lunas pinjaman pertama kembali bersama anggota KSM Sejahtera kembali meminjam ke UPK BKM sebesar Rp 1.000.000,- /orang dan setelah itu usaha dari pak Ismed semakin berkembang dan pinjaman di putaran kedua digunakan untuk membangun kios usahanya dan setelah itu pada Tahun 2009 setelah Pinjaman keduanya lunas kemudian melanjutkan pinjamannya untuk memenuhi kebutuhan Usaha lanjutan senilai Rp 1.500.000,- dan ini juga berlaku kepada seluruh anggota kelompoknya. Berdasarkan dari hasil usaha Pak Ismed, beliau sangat bersyukur mendapatkan pinjaman Bergulir tersebut dan benar benar digunakan untuk*

*kebutuhan usahanya, awalnya pemasukan kotor pak Ismed sebelum mendapatkan Pinjaman bergulir hanya Rp 60.000,-/Hari dan setelah mendapatkan pinjaman bergulir sekarang sudah mendapatkan pemasukan kotor RP 500.000 s/d Rp 600.000 /Hari.*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan dana bergulir UPK BKM Surya Abadi berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

d) Perluasan Akses Lingkungan

Dari berbagai macam kegiatan lingkungan yang diberikan langsung kepada masyarakat berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan. Terutama dalam hal pemeliharaan pekerjaan yang masyarakat merasakan langsung muncul suatu sikap memiliki, selain itu gotong royong dapat ditingkatkan dan terjadi efisiensi anggaran dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga belum tentu terjamin pemeliharaannya.

Perwujudan kegiatan modal sosial dapat dilihat dari keaktifan warga masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti program *Green and Clean* yang merupakan program Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang hijau dan bersih. Program tersebut diperlombakan di setiap RW yang berada di Kota Makassar. Penuturan informan sebagai berikut:

*Contohnya dalam hal penataan lingkungan. Apabila masyarakat menilai saya bahwa kegiatan apa yang saya rencanakan itu hanya untuk kepentingan saya tetapi bila mereka merasa bahwa apa yang direncanakan itu bermanfaat bagi mereka maka mereka akan ikut bekerja. Seperti Green Clean, dilakukan bersama-sama membersihkan got. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

Untuk menggerakkan kegiatan tersebut tentunya dibutuhkan wadah sehingga lebih mudah untuk menkoordinasikannya mulai dari tingkat pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kelurahan sampai ke tingkat pemerintahan yang paling terendah dalam hal ini RT. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

*Sebenarnya hal ini sudah dilakukan secara rutin. Yang mengkoordinir adalah saya sendiri selaku Ketua RT dan yang menginformasikan pak Lurah. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

Bentuk kegiatan lain dari kegiatan modal sosial dalam hal ini kerjasama dan kepercayaan adalah dalam kegiatan 17 Agustusan, yang merupakan agenda rutin tiap tahunnya. Kegiatan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya dorongan dari pemerintah setempat untuk menggerakkannya. Seperti penuturan informan sebagai berikut:

*Misalnya pada kegiatan 17 Agustusan biasanya diperintahkan oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan sehingga bisa disimpulkan bahwa perlu ada motivator yang menggerakkan. (Wawancara dengan MET September 2010)*

Jadi untuk menggerakkan kerjasama di tengah masyarakat dibutuhkan seorang motivator dalam membangkitkan semangat warga untuk bekerja sama. Harus ada contoh teladan.

Pada dasarnya masyarakat kelurahan Bara-baraya Utara masih menjaga kepercayaan, kerjasama diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan baik yang dikoordinir secara kelembagaan maupun secara spontanitas. Walaupun frekuensinya sudah bergeser dibandingkan dengan masa lalu. Sehingga membutuhkan pembinaan dari seluruh

stakeholder baik pemerintah, masyarakat itu sendiri dan kelompok peduli yang fokus terhadap penanggulangan kemiskinan

Dari pembahasan tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada modal sosial memberikan kontribusi terhadap pembangunan lingkungan.

### **3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di BKM Surya Abadi dan Yayasan Mesjid Ilham**

#### **a. BKM Surya Abadi**

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Barabraya Utara maka BKM Surya Abadi telah menyusun dokumen perencanaan yaitu PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan). PJM Pronangkis merupakan daftar permasalahan, daftar potensi SDM, SDA dan potensi luar, daftar alternatif penyelesaian masalah, sasaran penerima manfaat. PJM Pronangkis ini berlaku untuk masa waktu 3 tahun dan setiap tahunnya dilakukan peninjauan prioritas termasuk permasalahan yang baru.

#### **b. Yayasan Mesjid Ilham**

Pada kondisi yayasan Mesjid Ilham kegiatan yang fokus terhadap penanggulangan kemiskinan yaitu seksi kesejahteraan jamaah. Jadi setiap seksinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Daftar yang ada pada seksi kesejahteraan jamaah yaitu berupa daftar donatur yang terpasang di papan info mesjid terpisah dengan daftar donatur pembangunan mesjid. Kegiatan ini tersendiri. Menyangkut

sasarannya yaitu seluruh jamaah mesjid yang berhak mendapatkan santunan.

### **C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Mendorong Modal Sosial mengatasi Masalah Kemiskinan**

Pada tahap awal dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota (warga masyarakat), memastikan ada yang akan bertanggung jawab untuk menggerakkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan, untuk itu diperlukan seorang atau sekelompok pemimpin. Dalam organisasi, kelompok, atau komunitas warga masyarakat peranan sikap dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, peduli dan melindungi anggotanya (warga), akan menumbuhkan kepercayaan dari semua unsur komunitasnya.

Setelah tujuan ditetapkan, harus ada perencanaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Adalah penting untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang dirasakan oleh anggotanya untuk memecahkan masalah. Untuk itulah perlunya keterlibatan (partisipasi) warga masyarakat dalam proses menemukani masalah (kebutuhan) mereka yang akan menjadi dasar perencanaan. Kebutuhan yang ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan warga masyarakat, sering tidak menjawab masalah yang sebenarnya ada

sehingga dapat menghilangkan kepercayaan warga kepada niat baik pemimpinnya.

Untuk memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat efektif dalam pelaksanaannya, dan semua orang melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya maka harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terbuka dengan semua warga.

Kemudian setelah kepercayaan sudah berjalan maka hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti dalam membangun dan mendorong Modal Sosial dimasyarakat yaitu ;

### **1. Proses Pembelajaran di Masyarakat**

Menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakkan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai pihak, melalui lembaga-lembaga di kelurahan, melibatkan seluruh unsur masyarakat di dalam setiap tahapan program mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi.

Menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok-kelompok, sehingga dibentuk bukan hanya sekedar untuk kepentingan kerana ada program akan tetapi menjadi sarana kegiatan bersama. Saling menghargai, saling percaya di antara anggota kelompok akan tumbuh apabila kelompok tersebut dibangun dalam suasana keterbukaan, kejujuran, keikhlasan dan saling peduli di antara

anggotanya. Dalam kelompok yang seperti ini yang menjadi hal utama adalah tujuan kelompok bukan tujuan pribadi. Kejujuran dalam pengelolaan juga akan menjadi modal untuk dapat dipercaya oleh kelompok masyarakat yang lain baik warga kelurahan setempat atau pihak lain, sehingga kemungkinan untuk bermitra dengan berbagai pihak menjadi sangat terbuka. Misalnya: pengembalian dana bergulir dari KSM, akan menumbuhkan kepercayaan dari warga lain, juga lembaga-lembaga sosial di kelurahan terhadap kelompok tersebut.

Hal tersebut disadari betul oleh informan yang menyatakan bahwa pembelajaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan perlu di tingkatkan kembali dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan. Seperti dalam budaya gotong royong sehingga perlu dikembangkan kembali komunikasi antara warga masyarakat, pemerintah setempat dan lembaga-lembaga lokal yang ada di kelurahan. Seperti penuturan informan HDg. T sebagai berikut :

*Sangat bermanfaat dan memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita masih perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pada penanggulangan kemiskinan. Kesan saya mengingatkan kembali bahwa budaya gotong royong perlu dikembangkan sehingga perlu dilakukan lagi komunikasi antara lembaga dan warga. (Wawancara dengan HDg. T September 2010)*

Jadi diperlukan komunikasi antar lembaga yang ada. Sehingga tidak terjadi kesan pemerintah berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri. Jadi komunikasi itu penting dijaga diantara pemangku kepentingan yang ada.

Proses pembelajaran dapat diterapkan langsung melalui pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap pembangunan seperti menjadi panitia kegiatan pembangunan jalan lingkungan. Di dalam kepanitiaan tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang pembelian barang, bidang penerimaan barang, tukang dan pekerja. Masyarakat yang dipercayakan menjadi kepanitiaan akan bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan di wilayahnya. Dari beberapa informan pernah terlibat langsung dalam kepanitiaan pembangunan lingkungan di wilayahnya seperti informan Then pernah menjadi ketua panitia pembangunan Plat Duicker dari bantuan swadaya masyarakat dan PNPM MP/P2KP. Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan tersebut yaitu:

- a. Proses pembelajaran masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan.
- b. Proses pembelajaran masyarakat dalam menggalang swadaya artinya ada partisipasi yang masyarakat mulai bangun, baik dari segi anggaran, tenaga maupun konsumsi.
- c. Proses pembelajaran masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan pasca pembangunan konstruksi.
- d. Proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan transparansi dan akuntabilitas artinya ada proses pertanggungjawaban baik secara administrasi keuangan maupun secara moral.

- e. Proses pembelajaran masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian bahwa pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi tanggung jawab kita bersama.

Proses pembelajaran ini menjadi kebiasaan dan masyarakat akan terbiasa dengan hal ini maka akan terinternalisasi ke berbagai aspek kegiatan pembangunan di masyarakat.

## **2. Penguatan Kelembagaan dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Kebijakan yang bersifat sentralistis dan kedudukan masyarakat yang cenderung sebagai obyek pembangunan telah mendorong terjadinya penetrasi negara dan pasar yang berlebihan dalam masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Hal itu menyebabkan dalam realitas ekonomi, sosial dan politik kehidupan bangsa, melalui proses yang cukup panjang peranan negara dan pasar jauh lebih kuat dari sektor masyarakat. Kenyataan tersebut telah mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat dalam berhadapan dengan negara dan pasar, sehingga mengakibatkan sebagian lapisan masyarakat semakin termarginalkan dengan kondisi kesejahteraan sosial yang rendah. Maka posisi masyarakat khususnya masyarakat lokal berada dalam kondisi yang lemah dibanding negara dan pasar atau sektor swasta. Dengan demikian, hubungan sinergis yang bersifat saling menguntungkan sulit diharapkan, bahkan sangat potensial menjurus pada hubungan yang eksploitatif. Upaya yang paling strategis untuk keluar dari kondisi tersebut adalah melalui pemberdayaan. Apabila

dilakukan secara individual, kedudukan warga masyarakat lokal tetap lemah dan potensi tawar terhadap negara dan pasar juga kurang kuat. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tindakan bersama, terutama tindakan bersama melalui institusi sosial yang berada pada tingkat lokal. Institusi lokal ini diharapkan dapat berkedudukan sebagai struktur mediasi yang dapat menjembatani kehidupan privat dan kehidupan publik (Nugroho dalam Soetomo, 2006: 456).

Membahas tentang penanggulangan kemiskinan tidak cukup dengan tindakan perseorangan. Akan tetapi, dibutuhkan suatu wadah untuk menghimpun seluruh permasalahan, kepentingan dari masyarakat miskin itu sendiri di sebuah wilayah termasuk juga Kelurahan Bara-baraya Utara. Senada dengan pendapat informan NTIA yang menyatakan bahwa lembaga tersebut diperlukan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Karena lembaga tersebut bisa memberikan motivasi kepada warga dengan tentunya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan agar tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan kepada warga miskin. Seperti penuturan informan sebagai berikut.

*Lembaga itu penting karena lembaga yang memotivasi warga tetapi lembaga harus bekerjasama dengan stakeholder yang ada sehingga penanggulangan kemiskinan tidak salah sasaran. (Wawancara dengan MET September 2010)*

Mustahil penanggulangan kemiskinan tersebut berhasil tanpa peran serta dari seluruh masyarakat. Artinya antara pemerintah setempat dan masyarakat itu sendiri harus terjadi sinergi di dalamnya dalam penanggulangan kemiskinan. Seperti penuturan informan sebagai berikut :

*Memang sangat diperlukan karena biar ada lembaga tapi tidak ada kepedulian masyarakat maka mustahil saja. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

*Kalau penanggulangan kemiskinan dihubungkan dengan lembaga seperti BKM atau LPM, PKK, posyandu. (Wawancara dengan HDg. T September 2010)*

Penulis mencoba menguraikan dalam bentuk gambar sederhana tentang keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanggulangan kemiskinan. Gambar tersebut sebagai berikut.

**Gambar 5.3**  
**Keterlibatan seluruh Stakeholder dalam**  
**Penanggulangan Kemiskinan**



Gambar tersebut di atas menjelaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat tiga komponen stakeholder yang saling membutuhkan yaitu pemerintah setempat dalam hal ini mulai tingkatan paling tertinggi kelurahan sampai RW, RT, Lembaga lokal dalam hal ini LPM, BKM, Posyandu, PKK, dll. Dan masyarakat itu sendiri. Ketiga stakeholder tersebut diharapkan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing, dengan dasar modal sosial yaitu kerjasama, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Menurut pendapat informan IBRA sebagai berikut :

*Diharapkan bagaimana kerjasama itu dapat berjalan selama masyarakat saling percaya. Kalo hanya wacana maka mustahil. (Wawancara dengan IBRA September 2010)*

Informan IBRA menyatakan bahwa kerjasama tersebut dapat terlaksana dengan dasar harus ada kepercayaan di tingkat masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan lembaga lokal yang ada demikian juga dalam antar lembaga itu sendiri. Jadi tidak cukup dengan antar kelompok masyarakat akan tetapi yang lebih penting orang-orang yang terlibat dalam lembaga tersebut harus saling percaya dan kerjasama. Senada dengan penuturan informan ABDR sebagai berikut :

*Kerjasama itu sudah ada di dalam, bagaimana organisasi itu bisa ? Tergantung, mungkin bukan dari BKM tetapi bagaimana kita membuat organisasi lembaga kecil yang membuat suatu donatur untuk penanggulangan kemiskinan. Misalnya kita membuat kesepakatan di suatu RW untuk menyumbang, kita jadikan ini sumbangan wajib untuk kemaslahatan warga miskin. Kalo ini*

*berjalan maka RW lain akan mengikuti. (Wawancara dengan ABDR September 2010)*

Informan ABDR menjelaskan sesungguhnya kerjasama itu ada di dalam sebuah organisasi. ABDR mencontohkan BKM, tetapi bukan hanya BKM tetapi sampai lembaga yang paling terkecil untuk membuat donator untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi harus ada yang memulai terlebih dahulu kemudian yang lainnya akan meniru. Sekali lagi perlu ada motivator seperti penuturan NAS sebagai berikut:

*Perlu ada motivator. (Wawancara dengan NAS September 2010)*

**3. Peran Pemerintah Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan, yaitu :**

- a) Fasilitator : Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
- b) Regulator : Menyiapkan arah dan kebijakan
- c) Dinamisator : Menggerakkan partisipasi semua unsur yang ada di masyarakat.
- d) Koordinator : Mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme perencanaan partisipatif.
- e) Melindungi dan memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya (hak sosial, hak ekonomi dan hak politik). Hak sosial yaitu mendorong untuk menumbuh kembangkan kelembagaan partisipasi masyarakat dan akses pelayanan sosial

dasar (kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta kebutuhan sosial lainnya). Hak ekonomi yaitu meningkatkan akses masyarakat pada sumber-sumber pendapatan yang memungkinkan menopang kehidupan yang layak, seperti perluasan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Hak politik yaitu harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan politik.

Hal tersebut di atas senada dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yang menginginkan perlu adanya motivator dalam penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan sangat kompleks sehingga dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder untuk memikirkannya. Sesuai wawancara dengan informan sebagai berikut :

*Penanggulangan kemiskinan sebenarnya bisa ditanggulangi masyarakat tapi tidak semua. Kita masyarakat perlu motivator. Masalah kemiskinan di Barut sangat kompleks dan biasanya dikoordinir oleh kelurahan, misalnya ada program pemerintah turun maka masyarakat melakukan saja tanpa ada inisiatif. Sedangkan insidental masih berjalan di sini (Wawancara dengan MET September 2010)*

Jadi untuk menanggulangi kemiskinan perlu pembelajaran di masyarakat dan keterlibatan seluruh stakeholder yang ada sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Selama ini masyarakat mengalami krisis melemahnya modal sosial, walaupun dipahami sebagai salah satu faktor penting dalam mengatasi berbagai persoalan khususnya masalah pembangunan dan kemiskinan. Kontribusi modal sosial yang sangat strategis dari masalah sosial belum menjadi salah satu pendekatan bahkan kebijakan dalam melakukan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan secara komprehensif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk dan eksistensi modal sosial berada pada lembaga BKM Surya Abadi dan Yayasan Mesjid Ilham Seksi Kesejahteraan Jamaah. Dalam bentuk kepercayaan seperti, peminjaman dana bergulir oleh UPK kepada KSM, memilih pengurus BKM, penggalangan dana oleh Seksi Kesejahteraan Jamaah. Dalam bentuk kerjasama (Networking) seperti, kerjasama antara Anggota BKM, Kerjasama antara Anggota BKM dengan Masyarakat, Kerjasama antara Masyarakat dengan Masyarakat, Kerjasama antara BKM dengan lembaga diluar kelurahan (Kemitraan) dan penggalangan dana untuk santunan pada Yayasan Mesjid Ilham.

Sedangkan sanksi yang berlaku pada masyarakat berupa sanksi moral dan tanggung renteng.

2. Kontribusi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu telah berhasil memperluas akses dibidang kesehatan berupa santunan kepada warga miskin dan mampu yang tergabung dalam Yayasan Mesjid Ilham, BKM Surya Abadi telah berhasil memperluas akses dibidang ekonomi berupa bantuan modal usaha (dana bergulir) kepada warga miskin yang bergabung dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan indikator lancar dalam pengembalian pinjaman dan perputaran usaha dibuktikan dengan meminjam 2-3 kali pada UPK. Selain itu telah berhasil memupuk laba/jasa, pada akhir tahun 2008 memperoleh laba Rp. 19.190.867,-, pada akhir tahun 2009 memperoleh laba Rp. 34.782.165,-, pada alhir tahun 2010 memperoleh laba Rp. 27.238.791,-. Dari hasil laba tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan lingkungan, kegiatan sosial, penambahan modal serta biaya operasional BKM. Selain itu BKM Surya abadi telah berhasil memperluas akses dibidang pendidikan berupa pelatihan peningkatan SDM kepada warga miskin, dan secara umum masyarakat Kelurahan Bara-baraya Utara berhasil memperluas akses dibidang lingkungan berupa keikutsertaan dalam program green and clean dan pembangunan lingkungan kepada warga secara umumnya dan warga miskin secara khusus.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong modal dalam penanggulangan kemiskinan yaitu: (1). Proses pembelajaran di masyarakat yaitu menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakkan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai pihak, melalui lembaga-lembaga di kelurahan, melibatkan seluruh unsur masyarakat di dalam setiap tahapan program dari mulai identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. (2). Penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu menunjukkan peranan BKM, Kelurahan, LPM dan lainnya berperan sebagai motivator dalam penanggulangan serta (3). Peran pemerintah lokal dalam penanggulangan kemiskinan yaitu berperan sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, koordinator dan melindungi serta memfasilitasi masyarakat.

## **B. SARAN**

Berbagai sumbangsi pemikiran berikut ini merupakan saran dalam upaya internalisasi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan:

1. Membudayakan Modal Sosial sebagai bagian dari strategi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting, namun hal ini dapat dilakukan apabila Modal Sosial yang ada di masyarakat kelurahan

diorganisir dengan baik melalui lembaga yang bisa dipercaya baik dari masyarakat maupun dari pihak lainnya.

2. Menumbuhkembangkan ikatan sosial masyarakat yang telah terhimpun di dalam satu lembaga agar bisa menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Dalam aplikasi kebijakan pada level masyarakat bahwa lebih efisien dan efektif sebuah program ketika diserahkan langsung kepada masyarakat melalui lembaga yang betul-betul representatif dan mengakar hal ini harus dibuktikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga menjadi sebuah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat
4. Diharapkan agar program pemerintah yang sifatnya kegiatan sosial kemasyarakatan melalui instansi terkait dapat bersinergi dengan program masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukmianto, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

*Makassar Dalam Angka 2008*, Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2008

*Makassar Dalam Angka 2009*, Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2009

Bornstein, David, 2006, *Mengubah Dunia: Kewirausahaan Sosial dan Kekuatan Gagasan Baru*, Diterjemahkan oleh Marco Kusumawijaya, Yogyakarta: INSISTPress-Nurani Dunia

Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Pengusaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

\_\_\_\_\_, Burhan, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Gany, Radi A, 2001, *Menyongsong Abad Baru Pendekatan Pembangunan Berbasis kemandirian Lokal*, Makassar: Hasanuddin University Press

Giddens, Anthony, Daniel Bell, Micael Forse. etc, 2004, *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, Diterjemahkan oleh Ninik Rochani Sjams, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Hamid, Almisar, *Potensi Modal Sosial Umat Islam Untuk Pembangunan*, <http://www.depsos.go.id> akses 20 Desember 2009 pukul 21.02

Handam, 2009, *Analisis Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus P2KP di Kelurahan Maricaya Kota Makassar)*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

Haris, Andi, 1995, *Paradigma-paradigma Utama dalam Teori Sosiologi*, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Mahasiswa Sosiologi se-Indonesia IV, dari tanggal 8-15 Desember 1995, di Ujung Pandang, Jurnal Sosiologi Socius, Edisi VI/ Agustus 1996

<http://www.masyarakatmandiri.org>, akses 19 Januari 2010 pukul 23.13

- Ife, Jim., Frank Tesoriero, 2008: *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Diterjemahkan oleh Sastrawan Manulang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismail, A.Ilyas, *Teologi Kemiskinan*, <http://ariejuwariah.multiply.com>, akses 15 Januari 2010 pukul 23.51
- Lawang, Robert M.Z, 2004, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: FISIP UI Press
- Laeyendecker L, 1983, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan*, Jakarta: PT. Gramedia
- Mintorahardjo, Sukowaluyo, Runtuhnya modal sosial, <http://www.unisosdem.org>, akses 21 Januari 2009 pukul 11.42
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu, 2000, *Desa Masa Depan; Garis Depan Demokrasi, (dalam Angger Jati Wijaya, dkk. (ed.), Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_, Taliziduhu, 1987, *Pembaharuan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: PT. Bina Aksara
- Narayan, Deepa, 2002, *Empowerment and Poverty Reduction*, World Bank, Washington DC.
- Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Heru, 2001, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ohama, Y, 2001, *Participatory Approach*, JICA International Training on PLSD Theories and Practices CIBID, Nagoya
- Patilima, Hamid, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Pranarka, A.M.W dan Vidyandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan (dalam Onny S.Prijono dan A.M.W. Pranarka, Pemberdayaan; Konsep Kebijakan dan Implementasi)*, Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

- Prijono, Onny S dan A.M. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan; Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre For Startegic and International Studies (CSIS).
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, Jakarta: Kencana
- Salman, Darmawan, 2009, *Perspektif dan Kecenderungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah di Indonesia*, Makalah disajikan dalam Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan Sosial bagi Mahasiswa PPS Sosiologi Unhas Semester 2, Tahun Ajaran 2008/2009.
- \_\_\_\_\_, Darmawan, 2004, *Kemiskinan Perkotaan: Urbanisasi Berlebih, Konsumsi Kolektif dan Involusi Kota Sebagai Basis Konstruksi Kemiskinan*, Makalah dalam Seminar Kemiskinan Perkotaan, Makassar: PSKMP
- \_\_\_\_\_, Darmawan, M. Macmud, 2002, *Agenda Kolaborasi dalam Reduksi Kemiskinan: Menuju Pembentukan Modal Sosial*, Jurnal Governance, No.2.Vol.1, Bandung: Pusdiklat Depdagri Regional Bandung.
- Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin, 2007, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tikson, T. Deddy, 2005, *Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*, Makassar: Inninawa
- Usman, Sunyoto, 2008, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

No.	Nama KSM	Jumlah Anggota KSM	Tahun 2008		2008	Indikator Pengembalian			2009
			Tanggal Pinjaman			Besaran Pinjaman	Lancar	Kurang Lancar	
			Pencairan	Jatuh Tempo	Besaran Pinjaman				
1	Anggrek	5	17-Feb-06	26-Nov-06	2,500,000			112,500	2,500,000
2	Macora Pulana	5	17-Feb-06	26-Nov-06	2,500,000			237,500	2,500,000
3	Delima	5	17-Feb-06	26-Nov-06	2,500,000			250,000	2,500,000
4	Mekar	5	2-Sep-06	10-Jun-07	2,500,000			100,000	2,500,000
5	Cemara Biru	5	2-Sep-06	10-Jun-07	2,500,000			165,000	2,500,000
6	Melati	5	2-Sep-06	10-Jun-07	2,500,000			37,500	2,500,000
7	Tri Darma	3	19-Feb-07	25-Nov-07	1,500,000			625,000	1,500,000
8	Bunga	5	16-Oct-07	13-Oct-08	2,500,000		1,000,000		2,500,000
9	Jaya Abadi	5	1-Feb-08	09-Nov-08	3,750,000	-			3,750,000
10	Ian Sari	6	1-Feb-08	09-Nov-08	3,000,000		132,000		3,000,000
11	Sederhana 1	6	16-Feb-08	22-Nov-08	3,000,000		250,000		3,000,000
12	Mujur	5	8-Mar-08	13-Dec-08	3,250,000		420,500		3,250,000
13	Mulia	7			5,250,000	1,743,750			5,250,000
14	Sedap Malam	7			5,250,000	1,575,000			5,250,000
15	Maya	7			3,500,000	1,137,500			3,500,000
16	Bunga Ros	7			3,500,000	1,312,500			3,500,000
17	Manggis	6			3,000,000	837,500			3,000,000
18	Bunga Ros	5			2,500,000	687,500			2,500,000
19	Lestari	5			2,500,000	1,175,000			2,500,000
20	Bajiminasa	5			2,500,000	900,000			2,500,000
21	Suci Damai	5			2,500,000	925,000			2,500,000
22	Bina Bersama	5			2,500,000		1,550,000		2,500,000
23	Jingga	5	28-Mar-09	5-Jan-10	2,500,000		1,250,000		2,500,000
24	Bina Jaya	5	28-Mar-09	5-Jan-10	2,500,000	812,500			2,500,000
25	Sunggu Manai	5	28-Mar-09	5-Jan-10	2,500,000	875,000			2,500,000

26	Rezki	5	28-Mar-09	5-Jan-10	2,500,000	812,500			2,500,000
27	Seruni	7	28-Mar-09	5-Jan-10	3,500,000	1,050,000			3,500,000
28	Flamboyan	5	28-Mar-09	5-Jan-10	5,000,000	2,125,000			5,000,000
29	Asoka	5	28-Mar-09	5-Jan-10	5,000,000	2,125,000			5,000,000
30	Paraiatte	5	28-Mar-09	5-Jan-10	3,750,000	1,593,750			3,750,000
31	Gatra Pelita	5	28-Mar-09	5-Jan-10	3,750,000	1,593,750			3,750,000
32	Pelangi	3	28-Mar-09	5-Jan-10	1,750,000	743,250			1,750,000
33	Padaidi	5	2-May-09	7-Feb-10	2,500,000	1,062,500			2,500,000
34	Sehati	7	2-May-09	7-Feb-10	7,000,000	3,850,000			7,000,000
35	Kamboja	5	2-May-09	7-Feb-10	5,000,000	2,875,000			5,000,000
36	Sipakainga	5	2-May-09	7-Feb-10	2,500,000	2,062,500			2,500,000
37	Sukamaju	5	2-May-09	7-Feb-10	2,500,000	2,062,500			2,500,000
38	Merpati	5	2-May-09	7-Feb-10	2,500,000	2,062,500			2,500,000
39	Garuda	5	2-May-09	7-Feb-10	2,500,000	2,062,500			2,500,000
40	Harapan Kita	4	11-Jun-09	16-Mar-10	3,000,000	2,700,000			3,000,000
41	Matahari	4	11-Jun-09	16-Mar-10	4,000,000	3,600,000			4,000,000
42	Seroja	5	15-Aug-09	21-May-10	5,000,000	4,500,000			5,000,000
43	Teratai	7	15-Aug-09	21-May-10	7,000,000	6,300,000			7,000,000
44	Senang Hati 1	4	15-Aug-09	21-May-10	4,000,000	3,600,000			4,000,000
45	Senang Hati 2	5	15-Aug-09	21-May-10	5,000,000	4,625,000			5,000,000
46	Cendana	5	5-Sep-09	12-Jun-10	5,000,000	4,500,000			5,000,000
47	Harapan Bersama	5	5-Sep-09	12-Jun-10	5,000,000	4,625,000			5,000,000
48	Permas	5	5-Sep-09	12-Jun-10	5,000,000	4,500,000			5,000,000
49	Sejahtera	7	5-Sep-09	12-Jun-10	7,000,000	6,475,000			7,000,000
50	Mekar Jaya	5	5-Sep-09	12-Jun-10	5,000,000	4,875,000			5,000,000
51	Sederhana 2	4	5-Sep-09	12-Jun-10	3,000,000	2,925,000			3,000,000
52	Dahlia	5			5,000,000	4,875,000			5,000,000
53	Appel	5			2,500,000	2,437,500			2,500,000
54	Merdeka	5			2,500,000	2,500,000			2,500,000
55	Sukaria	4			3,000,000	2,925,000			3,000,000
56	Tiktas	5			5,000,000	5,000,000			5,000,000
57	Anyelir	0							

290

198,250,000 98,730,750 4,602,500 1,527,500 198,250,000

Indikator Pengembalian		
Lancar	Kurang Lancar	Menunggak
		112,500
		237,500
		250,000
		100,000
		165,000
		37,500
		625,000
	1,000,000	
-		
	132,000	
	250,000	
	420,500	
1,743,750		
1,575,000		
1,137,500		
1,312,500		
837,500		
687,500		
1,175,000		
900,000		
925,000		
	1,550,000	
	1,250,000	
812,500		
875,000		

812,500		
1,050,000		
2,125,000		
2,125,000		
1,593,750		
1,593,750		
743,250		
1,062,500		
3,850,000		
2,875,000		
2,062,500		
2,062,500		
2,062,500		
2,062,500		
2,700,000		
3,600,000		
4,500,000		
6,300,000		
3,600,000		
4,625,000		
4,500,000		
4,625,000		
4,500,000		
6,475,000		
4,875,000		
2,925,000		
4,875,000		
2,437,500		
2,500,000		
2,925,000		
5,000,000		

98,730,750 4,602,500 1,527,500



No	Nama KSM	Anggota KSM	Masa Pinjaman 2008					Masa Pinjaman 2009					Masa Pinjaman 2010					Keterangan
			Tanggal Pinjaman		Besar	Sistim	Angsuran	Tanggal Pinjaman		Besar	Sistim	Angsuran	Tanggal Pinjaman		Besar	Sistim	Angsuran	
			Pencairan	Jatuh tempo	Pinjaman	angsuran	per minggu	Pencairan	Jatuh tempo	Pinjaman	angsuran	per minggu	Pencairan	Jatuh tempo	Pinjaman	angsuran	per minggu	
34	Sehati	7	06/09/2008	13/06/2009	7,000,000	Mingguan	175,000	11/06/2009	16/03/2010	7,000,000	Mingguan	175,000	04/05/2010	05/03/2011	10,500,000	Mingguan	262,500	3 Kali Pinjaman
35	Kamboja	5	06/09/2008	13/06/2009	5,000,000	Mingguan	125,000	11/06/2009	16/03/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	04/05/2010	05/03/2011	7,500,000	Mingguan	187,500	3 Kali Pinjaman
36	Sipakainga	5	09/11/2008	16/08/2009	2,500,000	Mingguan	62,500	15/08/2009	21/05/2010	3,750,000	Mingguan	93,750	29/5/2010	29/3/2011	5,000,000	Mingguan	125,000	3 Kali Pinjaman
37	Sukamaju	5	09/11/2008	16/08/2009	2,500,000	Mingguan	62,500	15/08/2009	21/05/2010	3,750,000	Mingguan	93,750	29/5/2010	29/3/2011	5,000,000	Mingguan	125,000	3 Kali Pinjaman
38	Merpati	5	09/11/2008	16/08/2009	2,500,000	Mingguan	62,500	15/08/2009	21/05/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	29/5/2010	29/3/2011	5,000,000	Mingguan	125,000	3 Kali Pinjaman
39	Garuda	5	09/11/2008	16/08/2009	2,500,000	Mingguan	62,500	05/09/2009	12/06/2010	3,750,000	Mingguan	93,750						2 Kali Pinjaman
40	Harapan Kita	4	29/11/2008	06/09/2009	3,000,000	Mingguan	75,000						08/04/2010	08/02/2011	7,000,000	Mingguan	175,000	2 Kali Pinjaman
41	Matahari	4	29/11/2008	06/09/2009	4,000,000	Mingguan	100,000	05/09/2009	12/06/2010	4,000,000	Mingguan	100,000	29/5/2010	29/3/2011	7,500,000	Mingguan	187,500	3 Kali Pinjaman
42	Seroja	5	29/11/2008	06/09/2009	5,000,000	Mingguan	125,000	05/09/2009	12/06/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	09/07/2010	07/05/2011	5,000,000	Mingguan	125,000	3 Kali Pinjaman
43	Teratai	7	29/11/2008	06/09/2009	7,000,000	Mingguan	175,000	17/10/2009	17/08/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	30/10/2010	30/08/2011	6,500,000	Mingguan	162,500	3 Kali Pinjaman
44	Senang Hati 1	4	29/11/2008	06/09/2009	4,000,000	Mingguan	100,000	15/08/2009	21/05/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	06/06/2010	06/04/2011	6,000,000	Mingguan	150,000	3 Kali Pinjaman
45	Senang Hati 2	5	29/11/2008	06/09/2009	5,000,000	Mingguan	125,000											1 Kali Pinjaman
46	Cendana	5	29/11/2008	06/09/2009	5,000,000	Mingguan	125,000	05/09/2009	12/06/2010	7,500,000	Mingguan	187,500	12/06/2010	12/04/2011	8,000,000	Mingguan	200,000	3 Kali Pinjaman
47	Harapan Bersama	5	29/11/2008	06/09/2009	5,000,000	Mingguan	125,000	03/10/2009	03/08/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	30/07/2010	30/05/2011	7,500,000	Mingguan	187,500	3 Kali Pinjaman
48	Permas	5	29/11/2008	06/09/2009	5,000,000	Mingguan	125,000	05/09/2009	12/06/2010	7,500,000	Mingguan	187,500	12/06/2010	12/04/2011	7,500,000	Mingguan	187,500	3 Kali Pinjaman
49	Sejahtera	7	29/11/2008	06/09/2009	7,000,000	Mingguan	175,000	22/09/2009	27/06/2010	6,000,000	Mingguan	150,000	09/07/2010	07/05/2011	7,000,000	Mingguan	175,000	3 Kali Pinjaman
50	Mekar Jaya	5	20/12/2008		5,000,000	Mingguan	125,000	03/10/2009	25/08/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	30/07/2010	30/05/2011	6,500,000	Mingguan	162,500	3 Kali Pinjaman
51	Sederhana 2	4	20/12/2008		3,000,000	Mingguan	75,000											1 Kali Pinjaman
52	Dahlia	5	20/12/2008		5,000,000	Mingguan	125,000	17/10/2009	17/08/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	09/07/2010	07/05/2011	7,500,000	Mingguan	187,500	3 Kali Pinjaman
53	Appel	5	20/12/2008		2,500,000	Mingguan	62,500	05/09/2009	05/06/2010	3,750,000	Mingguan	93,750	09/07/2010	07/05/2011	5,000,000	Mingguan	125,000	3 Kali Pinjaman
54	Merdeka	5	20/12/2008		2,500,000	Mingguan	62,500	17/10/2009	17/08/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	18/08/2010	06/08/2011	5,000,000	Mingguan	125,000	3 Kali Pinjaman
55	Sukaria	4	20/12/2008		3,000,000	Mingguan	75,000	03/10/2009	03/08/2010	4,500,000	Mingguan	112,500						2 Kali Pinjaman
56	Tiktas	5	20/12/2008		5,000,000	Mingguan	125,000											1 Kali Pinjaman
57	Anyelir	0																1 Kali Pinjaman
58	Cempaka	5						03/10/2009	03/08/2010	2,500,000	Mingguan	62,500	09/07/2010	07/05/2011	3,750,000	Mingguan	93,750	2 Kali Pinjaman
59	Latulip	5						03/10/2009	03/08/2010	2,500,000	Mingguan	62,500	09/07/2010	07/05/2011	3,750,000	Mingguan	93,750	2 Kali Pinjaman
60	Adilweys	5						03/10/2009	03/08/2010	2,500,000	Mingguan	62,500	09/07/2010	07/05/2011	3,750,000	Mingguan	93,750	2 Kali Pinjaman
61	Mawar	5						17/10/2009	17/08/2010	5,000,000	Mingguan	125,000	30/07/2010	30/05/2011	7,500,000	Mingguan	187,500	2 Kali Pinjaman
62	Cantik	3											08/04/2010	08/02/2011	3,000,000	Mingguan	75,000	1 Kali Pinjaman
63	Budi Luhur	5											08/04/2010	08/02/2011	2,500,000	Mingguan	62,500	1 Kali Pinjaman
64	Marannu	5											29/05/2010	29/03/2011	2,500,000	Mingguan	62,500	1 Kali Pinjaman
65	Terkini	5											29/5/2010	29/3/2011	2,500,000	Mingguan	62,500	1 Kali Pinjaman
66	Embun Pagi	3											30/07/2010	30/05/2011	3,000,000	Mingguan	75,000	1 Kali Pinjaman
67	Bulan Bintang	5											30/10/2010	30/08/2011	2,500,000	Mingguan	62,500	1 Kali Pinjaman
68	Mutiara	5											30/10/2010	30/08/2011	3,750,000	Mingguan	93,750	1 Kali Pinjaman
69	Rambutan	5											30/10/2010	30/08/2011	2,500,000	Mingguan	62,500	1 Kali Pinjaman
	JUMLAH	346			198,250,000					197,000,000					278,175,000			

DAFTAR DONATUR YAYASAN MESJID ILHAM  
SEKSI KESEJAHTERAAN JAMA'AH TAHUN 2011

No.	Nama	Tanggungjan	Setoran perbulan/orang	Miskin/ Non Miskin
1	Drs. KH. Jalaluddin Sanusi	7 Orang	4,000	Non Miskin
2	H. Muh. Arif	5 Orang	3,000	Non Miskin
3	Muh. Kiming, SE	2 Orang	1,500	Non Miskin
4	H. Hading Dg. Tutu	4 Orang	2,500	Non Miskin
5	Ibu Hanifah	2 Orang	2,500	Non Miskin
6	Dg. Ngawing	2 Orang	1,500	Miskin
7	B. Dg. Bundu	3 Orang	1,500	Non Miskin
8	Nur Halim Cala, BA	6 Orang	3,500	Non Miskin
9	H. Amir Sibali	7 Orang	4,000	Miskin
10	Nasrun, SE	3 Orang	2,000	Non Miskin
11	Sunggu Alam	3 Orang	2,000	Miskin
12	Dg. Sipato	2 Orang	1,500	Miskin
13	Ny. Hj. Hajirah	4 Orang	2,500	Non Miskin
14	Drs. Mursalim R	4 Orang	2,500	Non Miskin
15	Ny. Darima Simanu	2 Orang	1,500	Miskin
16	Amir Sikki	3 Orang	2,500	Miskin
17	Arsyad Sajo	4 Orang	2,500	Miskin
18	M. Hatta	4 Orang	2,500	Miskin

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR INFORMAN

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Informan SUJA

SUJA seorang laki-laki kelahiran Ujung Pandang, 16 Juni 1962, merupakan Lurah Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang. SUJA berdomisili tepatnya di Jl. Syech Yusuf BTN Minasa Upa Blok N 18/15. SUJA sebelum menjabat Lurah Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar merupakan Sekretaris Kelurahan Bara-baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar. Lurah yang memiliki 3 orang anak ini memiliki Visi dan Misi dalam rangka pembangunan yang ada di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar. Visinya yaitu mewujudkan masyarakat yang peduli lingkungan, pendidikan dan kesehatan dalam membangun masyarakat yang produktif dan sejahtera. Dan misinya yaitu *Pertama* terwujudnya kepedulian masyarakat akan pentingnya rasa aman di lingkungan pemukiman, *Kedua* terwujudnya kualitas sumber daya manusia, *Ketiga* terwujudnya hubungan yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dan *Keempat* tercapainya masyarakat sehat dan produktif yang berkelanjutan.

#### 2. Informan MET

MET seorang laki-laki kelahiran Toli-toli, 12 Februari 1976, MET berdomisili tepatnya di Jl. Dg. Siraju No. 94 Makassar. MET sebelumnya berdomisili di Perumnas. Setelah menikah dengan warga Bara-baraya Utara sejak tahun 2000 maka berdomisili di Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar. Dalam kesehariannya MET berprofesi sebagai pedagang. Dilingkungan masyarakat MET sering melibatkan diri sebagai seorang relawan membantu warga dalam pengurusan surat-menyurat dan kegiatan dana bergulir yang ada di kelurahannya dan sering dipercayakan sebagai moderator pada rapat-rapat yang dilaksanakan ditingkat kelurahan. Sejak tahun 2006 MET mengelolah dana bantuan modal usaha berupa dana bergulir dengan posisi sebagai ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sejahtera sampai sekarang. Selain itu dalam kepengurusan BKM periode tahun 2010-2012 MET dipercayakan menjabat sebagai UPL (Unit Pengelola Lingkungan).

### **3. Informan HDg.T**

HDg.T seorang laki-laki kelahiran Makassar, 31 Desember 1938, berdomisili tepatnya di Jl. Dg. Siraju No. 44 Makassar. HDg.T merupakan Ketua RW 2 Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar. Pada kepengurusan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) tahun 2004 sampai dengan 2006 dipercayakan menjabat sebagai koordinator BKM dan terpilih kembali sebagai Koordinator BKM pada priode kedua tahun 2006 sampai dengan 2008. Saat sekarang ini setelah tidak menjabat lagi sebagai koordinator BKM HDg.T dipercayakan menjabat sebagai pengelola dana bergulir dengan posisi Kasir UPK.

### **4. Informan ABDR**

ABDR seorang laki-laki kelahiran Makassar 3 September 1961 berdomisili tepatnya di Jl. Dg. Siraju No. 44 Makassar. Dalam kesehariannya ABDR berprofesi sebagai swasta. ABDR banyak terlibat di kegiatan LPM, BKM serta sebagai kelompok peduli terhadap penanggulangan kemiskinan.

### **5. Informan THEN**

THEN seorang laki-laki kelahiran Tana Toraja 4 Juni 1956 berdomisili tepatnya di Jl. Kerung-kerung Lr. 12 No. 14 dalam kesehariannya bertugas sebagai seorang polisi dengan pangkat Aipda. THEN juga dipercaya oleh warga untuk menjabat sebagai Ketua RW 1. Dalam program penanggulangan kemiskinan THEN pernah juga menjadi ketua panitia dalam pekerjaan plat duicker. Saat sekarang ini THEN lagi giat-giatnya mensosialisasikan program green and clean salah satu program kota Makassar dalam rangka menuju kota yang hijau dan bersih.

### **6. Informan NAS**

NAS seorang laki-laki kelahiran Sinjai 3 Mei 1973 berdomisili tepatnya di Jl. Muh Yamin Lr. XI No. 12. Dalam kesehariannya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. NAS banyak terlibat di kegiatan kemasyarakatan. Saat ini menjabat sebagai koordinator BKM, sekretaris LPM, pengurus Himpunan Masyarakat Sinjai se Kecamatan Makassar, seksi pembinaan remaja Mesjid Ilham Bara-baraya Utara dan ketua RT 05 RW 01 Kelurahan Bara-baraya Utara.

### **7. Informan IBRA**

IBRA seorang laki-laki kelahiran Bima, 27 Desember 1963 bertempat tinggal di Jl. Muh Yamin Lr. 9/4 Makassar. Dalam kesehariannya IBRA sebagai Karyawan Swasta. IBRA saat ini menjabat sebagai RT dan pengurus BKM di Kelurahan Bara-baraya Utara.

### 8. Informan NTIA

NTIA seorang perempuan kelahiran Majene, 31 Januari 1947 bertempat tinggal di Jl. Kerung-kerung Lr. 12 No. 21. Dalam kesehariannya NTIA sebagai seorang Ibu rumah tangga, saat sekarang ini dipercaya menjabat sebagai ketua RT di RW 1. NTIA juga banyak terlibat sebagai seorang relawan dalam program penanggulangan kemiskinan. Saat sekarang ini juga NTIA juga menjadi ketua KSM Flamboyan yang mempunyai anggota 5 orang. Selain itu juga mengkoordinir 10 KSM dalam rangka penagihan di tingkat warga dalam kegiatan pinjaman bergulir. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil wawancara dengan para informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

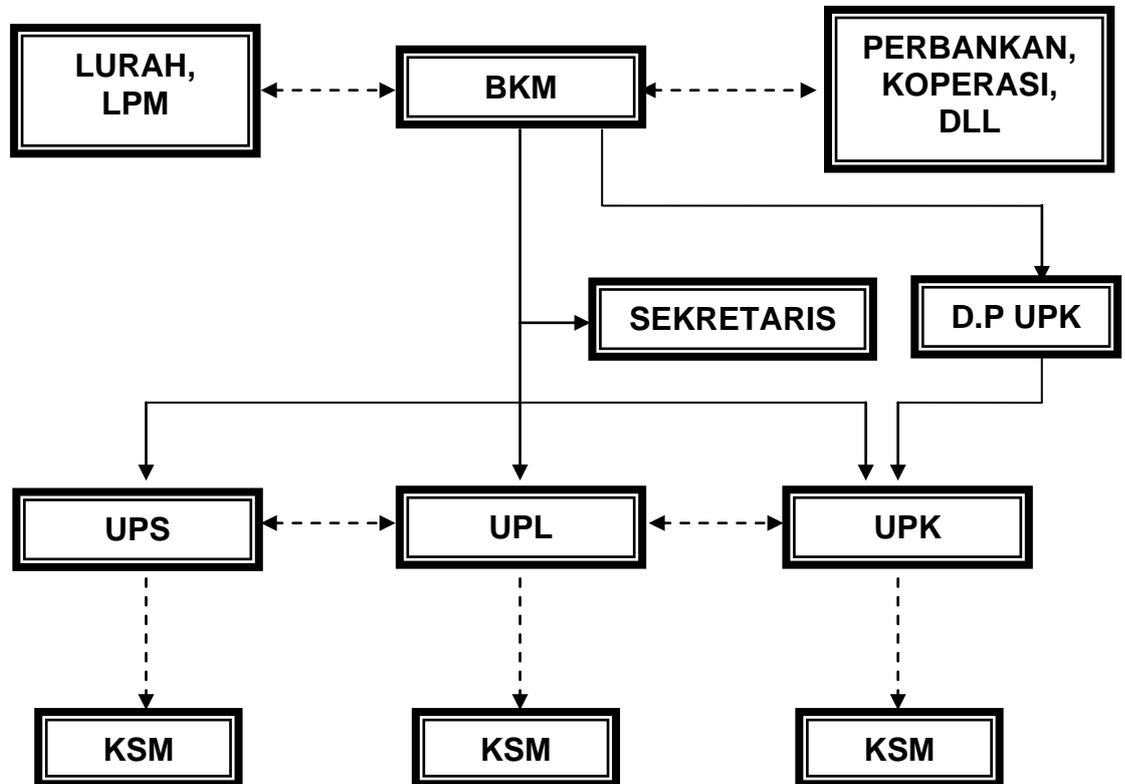
#### Hasil Wawancara dengan Para Informan

No.	Informan	Kelahiran, Alamat	Pekerjaan, Kegiatan Kemasyarakatan
1.	SUJA	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ujung Pandang, 16 Juni 1962</li><li>➤ Jl. Syech Yusuf BTN Minasa Upa Blok N 18/15</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lurah</li></ul>
2.	MET	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Toli-toli, 12 Februari 1976</li><li>➤ Jl. Dg. Siraju No. 94 Makassar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pedagang.</li><li>➤ Relawan</li><li>➤ Sering dipercayakan sebagai moderator pada rapat-rapat yang dilaksanakan ditingkat kelurahan</li><li>➤ Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sejahtera 2006 - sampai sekarang</li><li>➤ UPL (Unit Pengelola Lingkungan) BKM periode tahun 2010-2012</li></ul>
3.	HDg. T	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Makassar, 31 Desember 1938</li><li>➤ Jl. Dg. Siraju No. 44 Makassar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ketua RW 2</li><li>➤ Koordinator BKM tahun 2004-2006</li><li>➤ Koordinator BKM tahun 2006-2008</li><li>➤ Kasir UPK tahun 2008 - Sekarang</li></ul>

4.	ABDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Makassar 3 September 1961</li> <li>➤ Jl. Dg. Siraju No. 44 Makassar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Swasta</li> <li>➤ Pengurus LPM</li> <li>➤ Pernah menjadi Anggota BKM</li> <li>➤ Kelompok peduli terhadap penanggulangan kemiskinan</li> </ul>
5.	THEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tana Toraja 4 Juni 1956</li> <li>➤ Jl. Kerung-kerung Lr. 12 No. 14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Polisi dengan pangkat Aipda</li> <li>➤ Ketua RW 1</li> <li>➤ Pernah Menjadi Ketua Panitia Pekerjaan Plat Duicker</li> <li>➤ Penggiat Program Gereen and Clean (salah satu program kota Makassar dalam rangka menuju kota yang hijau dan bersih)</li> </ul>
6.	NAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sinjai 3 Mei 1973</li> <li>➤ Jl. Muh Yamin Lr. XI No. 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pegawai Negeri Sipil</li> <li>➤ Koordinator BKM</li> <li>➤ Sekretaris LPM</li> <li>➤ Pengurus Himpunan Masyarakat Sinjai se Kecamatan Makassar</li> <li>➤ Seksi pembinaan remaja Mesjid Ilham Bara-baraya Utara</li> <li>➤ Ketua RT 05 RW 01</li> </ul>
7.	IBRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bima, 27 Desember 1963</li> <li>➤ Jl. Muh Yamin Lr. 9/4 Makassar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Karyawan Swasta</li> <li>➤ Ketua RT</li> <li>➤ Pengurus BKM</li> </ul>
8.	NTIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majene, 31 Januari 1947</li> <li>➤ Jl. Kerung-kerung Lr. 12 No. 21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ibu Rumah Tangga</li> <li>➤ Relawan pada Program Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>➤ Ketua RT di RW 1</li> <li>➤ Ketua KSM Flamboyan</li> <li>➤ Mengkoordinir 10 KSM dalam rangka penagihan di tingkat warga dalam kegiatan pinjaman bergulir</li> </ul>

## LAMPIRAN 2

### STRUKTUR ORGANISASI BKM SURYA ABADI



#### KETERANGAN:

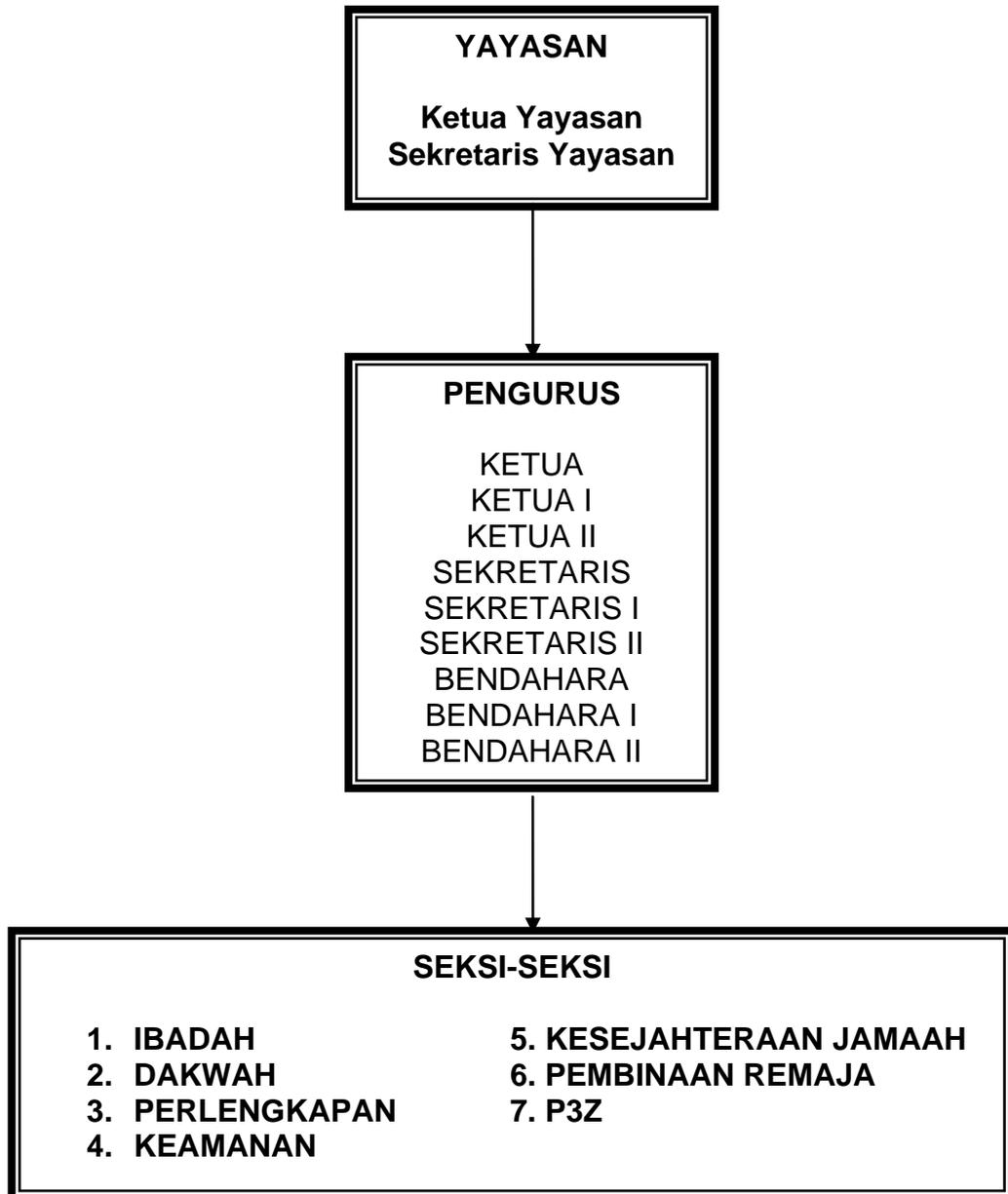
- > GARIS KOMANDO
- <-.-> GARIS KEMITRAAN/ KOORDINASI
- .-> GARIS FASILITASI

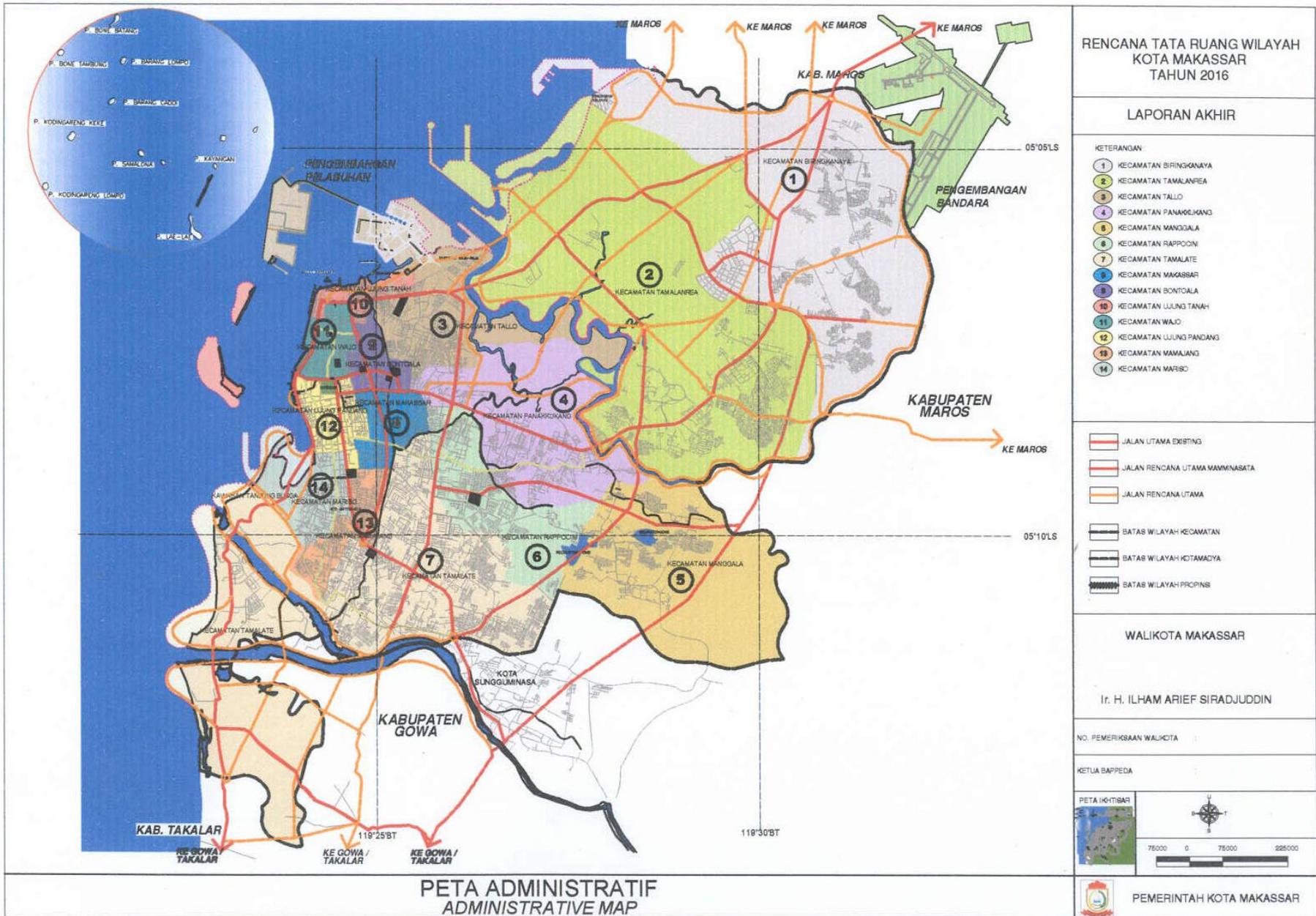
#### SINGKATAN :

- BKM : BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
- LPM : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- UPS : UNIT PENGELOLA SOSIAL
- UPL : UNIT PENGELOLA LINGKUNGAN
- UPK : UNIT PENGELOLA KEUANGAN
- D.P UPK : DEWAN PENGAWAS UPK
- KSM : KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

**LAMPIRAN 3**

**STRUKTUR KEPENGURUSAN YAYASAN MESJID ILHAM**





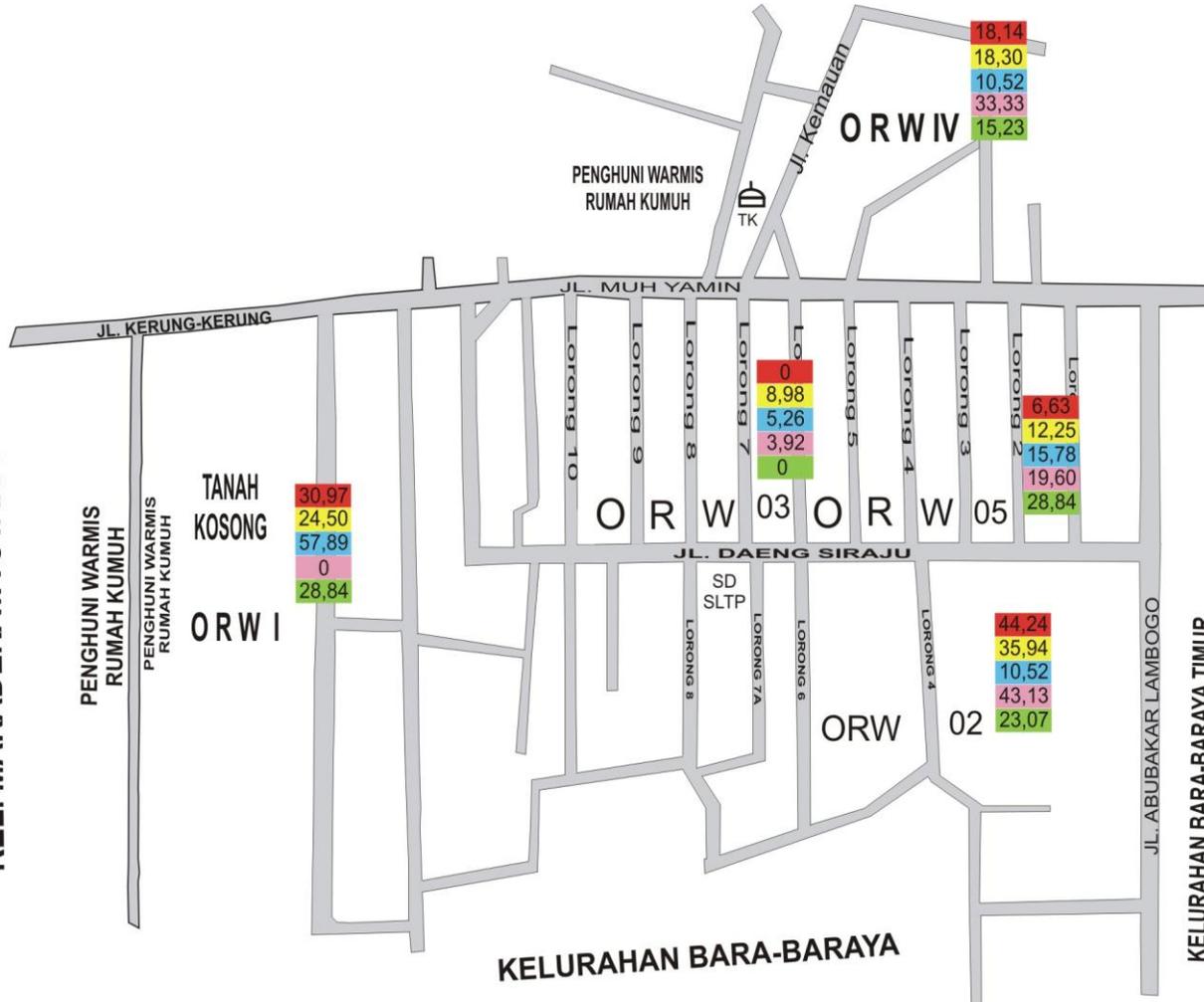
UTARA



KELURAHAN MACCINI

KELURAHAN MACCINI PARANG

KEL. MARADEKAYA UTARA



KELURAHAN BARA-BARAYA

KELURAHAN BARABARAYA UTARA  
KECAMATAN MAKASSAR  
KOTA MAKASSAR

NAMA GAMBAR

PETA MASALAH LINGKUNGAN (%)

- = Pembuangan Air Kotor Tidak Lancar
- = Pembuangan Sampah
- = Rumah Tidak Layak
- = Pencemaran Lingkungan
- = Tidak Punya WC

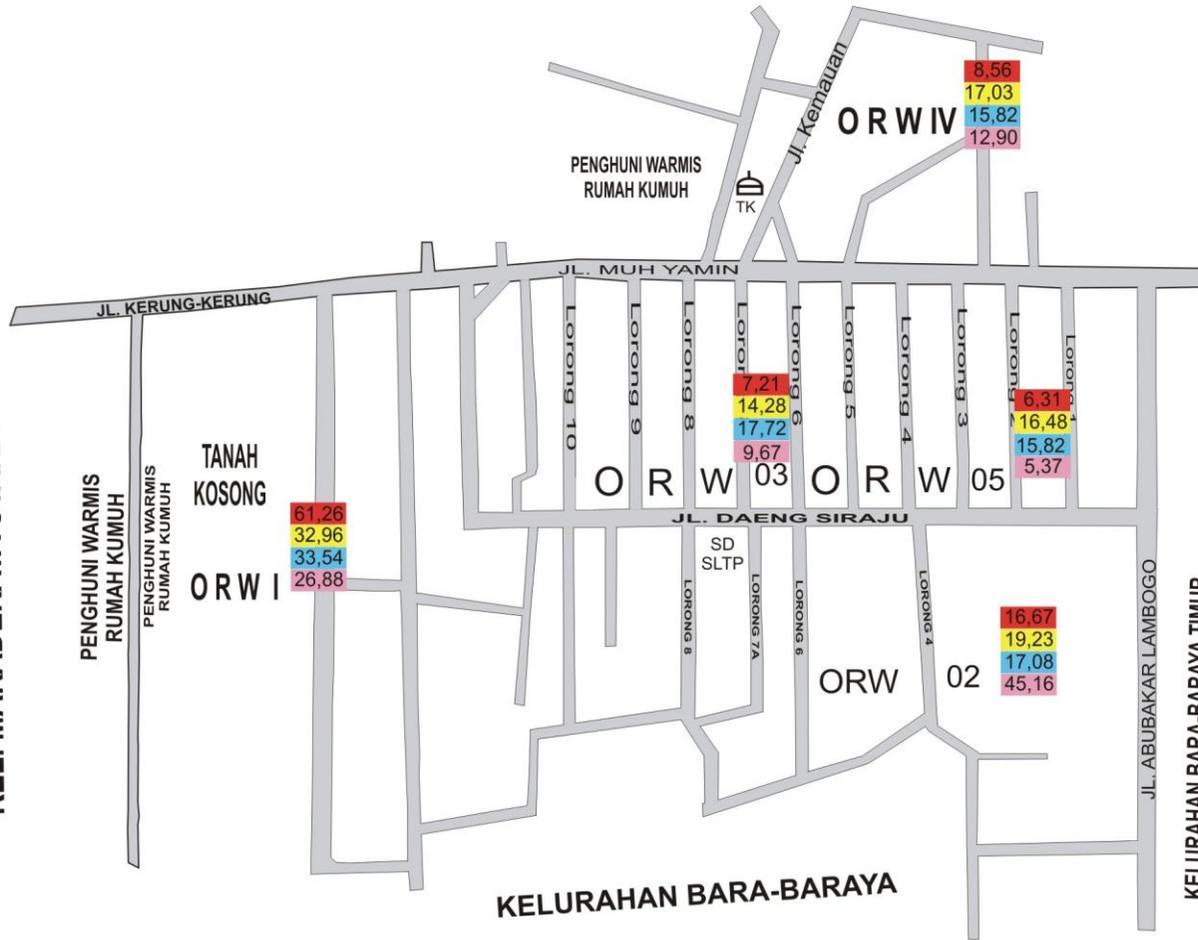
UTARA



KELURAHAN MACCINI

KELURAHAN MACCINI PARANG

KEL. MARADEKAYA UTARA



KELURAHAN BARA-BARAYA

KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR

KELURAHAN BARABARAYA UTARA  
KECAMATAN MAKASSAR  
KOTA MAKASSAR

NAMA GAMBAR

PETA MASALAH  
EKONOMI

- = Pendapatan Kurang
- = Pengangguran
- = Warmis/jompo
- = Perempuan yang Nganggur

UTARA



KELURAHAN MACCINI

KELURAHAN MACCINI PARANG

KEL. MARADEKAYA UTARA



KELURAHAN BARA-BARAYA

KELURAHAN BARABARAYA UTARA  
KECAMATAN MAKASSAR  
KOTA MAKASSAR

NAMA GAMBAR

PETA MASALAH  
SOSIAL DAN PENDIDIKAN (%)

- = Balita kurang Gizi
- = Ibu Hamil
- = TBC
- = Putus Sekolah Tinggi
- = Putus Sekolah
- = Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UTARA



KELURAHAN MACCINI

KELURAHAN MACCINI PARANG

KEL. MARADEKAYA UTARA



KELURAHAN BARA-BARAYA

KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR

KELURAHAN BARABARAYA UTARA  
KECAMATAN MAKASSAR  
KOTA MAKASSAR

NAMA GAMBAR

PETA MASALAH  
WARGA MISKIN (%)

RW I = 37,61

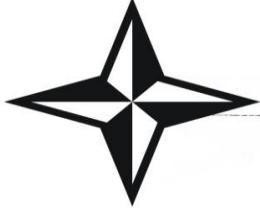
RW II = 16,51

RW III = 12,05

RW IV = 18,69

RW V = 8,37

UTARA



KELURAHAN MACCINI

KELURAHAN MACCINI PARANG

KEL. MARADEKAYA UTARA

PENGHUNI WARMIS  
RUMAH KUMUH

PENGHUNI WARMIS  
RUMAH KUMUH

TANAH  
KOSONG

ORW 01

Penghuni WARMIS  
Rumah Kumuh

TK

ORW 04

JL. KERUNG-KERUNG

JL. MUH YAMIN

Lorong 10

Lorong 9

Lorong 8

Lorong 7

Lorong 6

Lorong 5

Lorong 4

Lorong 3

Lorong 2

Lorong 1

ORW 03

ORW 05

JL. DAENG SIRAJU

LORONG 8

LORONG 7A

LORONG 6

ORW 02

LORONG 4

JL. ABUBAKAR LAMBOGO

KELURAHAN BARA-BARAYA

KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR